



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH telah divalidasi  
RAPAT KERJA KOMISI XI DPR RI**

Tahun Sidang : 2021 – 2022  
Masa Persidangan : III (Tiga)  
Rapat ke : ...  
Jenis Rapat : RDP (Rapat Dengar Pendapat)  
Dengan : Kepala BPKP  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, tanggal : Senin, 7 Februari 2022  
Pukul : 11.00 s.d. 14.10 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I,  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat dan virtual  
Ketua Rapat : Drs. Fathan /Wakil Ketua Komisi XI DPR RI  
Acara : 1. Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021  
2. Rencana Kerja Tahun 2022  
Sekretaris : Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos.  
Hadir : **A. Anggota DPR RI**  
30 dari 53 orang Anggota Komisi XI DPR RI dengan  
rincian:

**PIMPINAN**

3 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:  
1. DOLFIE, O.F.P (Wakil Ketua/F-PDIP)  
2. DR. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si (F-P.Nasdem)  
3. DRS. FATHAN (F-PKB)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN**

7 orang dari 11 orang Anggota :  
1. MARSIAMAN SARAGIH  
2. Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.  
3. Prof. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO  
4. I. G. A. RAI WIRAJAYA, S.E., M.M.  
5. INDAH KURNIA  
6. DR. H. MUSTHOFA, S.E., M.M.  
7. DR. SIHAR P H. SITORUS, BSBA, MBA

**2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**

5 orang Anggota dari 7 orang Anggota :  
1. H. MUHIDIN MOHAMAD SAID, S.E., MBA.  
2. MELCHIAS MARKUS MEKENG

3. H. ANDI ACHMAD DARA, S.E.
4. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, SE., MH.
5. PUTERI ANETTA KOMARUDIN

**3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**

4 orang Anggota dari 7 orang Anggota :

1. HERI GUNAWAN, S.E.
2. H. KAMRUSSAMAD
3. SUSI MARLENY BACHSIN, S.E., M.Sc.
4. ARDHYA PRATIWI S., S.E., M.Sc.

**4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT**

1 orang Anggota dari 5 orang Anggota :

1. SATORI, S.Pdi., M.M.

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

2 orang Anggota dari 3 orang Anggota :

1. H. ALAMAUDDIN DIMYATI ROIS
2. FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn.

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**

4 orang Anggota dari 5 orang Anggota :

1. Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si
2. DIDI IRAWADI SYMADUDDIN, S.H., LL.M.
3. HARMUSA OKTAVIANI
4. IR. MARWAN CIK ASAN, M.M.

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

2 orang Anggota dari 4 orang Anggota :

1. H. HIDAYATULLAH, SE
2. DR. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**

1 orang Anggota dari 4 orang Anggota :

1. AHMAD YOHAN, M.Si.

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

1 orang Anggota dari 1 orang Anggota :

1. DRA. Hj. WARTIAH, M.Pd.

**B. Undangan:**

Kepala BPKP beserta jajaran

**JALANNYA RAPAT :**

**KETUA RAPAT/F-PKB (Drs. FATHAN/WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI) :**

Selamat Pagi,  
Salam Sejahtera bagi kita semua,  
*Shalom,*  
*Namo Budhaya,*  
Salam Kebajikan,

Yang terhormat Saudara Kepala BPKP beserta jajarannya,  
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI serta hadirin yang berbahagia,

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi XI DPR RI RDP pada pagi hari ini bersama BPKP telah dihadiri sebanyak 20 anggota dari 8 fraksi dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam Tata Tertib DPR telah terpenuhi. Untuk itu, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* izinkan kami membuka RDP dengan Kepala BPKP dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.00 WIB)**

Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati,

Mengawali RDP pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT bahwa kita semua pada hari ini melaksanakan tugas-tugas konstitusi dengan keadaan sehat wal 'afiat. Agenda rapat pada hari ini adalah Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022 BPKP.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKB merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pengawasan Keuangan Negara atau Daerah dan Pembangunan Nasional. Keberhasilan bermuara pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, *good governance* yaitu suatu pemerintahan yang akuntabel, transparan, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan Rakyat Indonesia.

Pada RDP akan kita akan mendengarkan Pemaparan dari Kepala BPKP Capaian-capaian yang dilakukan oleh pada 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022. Selanjutnya saya persilakan Pak Kepala BPKP untuk menyampaikan Pemaparannya.

Silakan Pak Kepala.

**KEPALA BPKP (M. YUSUF ATEH) :**

Terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang, Pak Fathan,  
Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI yang kami muliakan, dan  
Teman-teman dari BPKP semua yang saya cintai,

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

*Wa 'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KEPALA BPKP (M. YUSUF ATEH) :**

Selamat Siang.

Salam Sejahtera untuk kita semua.

*Om Swastiastu.*

*Namo Buddaya.*

Salam Kebajikan.

Sebelum saya memulai, izin saya melaporkan Pak Ketua, Pak Pimpinan ini kami didampingi oleh Pak Sesma dan seluruh deputi dan juga para Eselon II di tempat kami yang saat ini memang sebagian ada di isolasi pak. Kami hari ini melakukan PCR seluruh pegawai, banyak sekali yang kena di tempat kami. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

**KETUA RAPAT :**

Amin, amin.

**KEPALA BPKP (M. YUSUF ATEH) :**

Kita semua bisa terus sehat dan bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik.

Bapak-Ibu sekalian yang kami muliakan,

Izinkan saya mengulang sedikit tentang tugas dan fungsi BPKP, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa tugas BPKP :

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional.

Fungsi intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang meliputi kegiatan lintas sektoral, kegiatan kebhendahaan KUM negara dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Bapak Presiden.

- 2) Kami melakukan reviu setiap tahun atas laporan keuangan pemerintah pusat sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan, melalui Menteri Keuangan kepada Bapak Presiden.
- 3) Fungsi kami yang ketiga adalah meningkatkan kapasitas pengawasan intern baik kementerian, lembaga, maupun daerah dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP yang tadi muaranya adalah seperti yang disampaikan Pak Fathan adalah untuk membangun tata kelola di kementerian, lembaga, maupun daerah.

Peran kami dalam pembangunan nasional, tadi disampaikan bahwa kami memang bertanggung jawab di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Peran pengawasan BPKP sebagai aparat pemerintah dalam melakukan pengawalan terhadap pembangunan nasional, melakukan pengamanan keuangan negara dan daerah, mengamankan aset negara dan daerah dan terakhir meningkatkan tata kelola.

Kami juga diamanatkan untuk melakukan koordinasi dan mengarahkan pengawasan internal kementerian lembaga daerah dan juga BUMN dan BUMD. Bapak Presiden pada Bulan Mei 2021 pada saat Rakornas pengawasan pemerintah juga menyampaikan pesan kepada kami untuk terus melakukan dan meningkatkan pengawalan percepatan belanja pemerintah baik di pusat maupun daerah. Dan yang kedua, meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program sejak awal untuk lebih menekankan memfokuskan pada pencegahan. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas data dikelola pemerintah karena selama masa pandemi ini data ini ternyata menjadi sangat krusial di dalam berbagai kegiatan-kegiatan program pemerintah mulai dari kesehatan sosial dan lain-lain, dan ini menjadi landasan keberhasilan dari pada program-program di masa dalam hal terkait dengan penanganan *Covid* dan ekonomi nasional.

Bapak-Ibu sekalian yang kami muliakan,

Jangkauan pengawasan kami dan 2021 sangat panjang sekali, luas sekali karena memang berbagai masalah-masalah baik yang lama dan baru muncul di Tahun 2021 dan selama Tahun 2021 ini kami telah mengawal, mengawasi 87 Kementerian lembaga, 542 Pemda, 108 BUMN, 1.133 BUMN dan 765 BLU dan BLT. Ini tentang pengawasan kami ini, ada beberapa, apa namanya, fokus kami di bidang kesehatan, kami sampaikan berbagai kegiatan di dalam layar mungkin tidak begitu jelas tapi ada juga perlindungan sosial, seluruh kegiatan dukungan UMKM, ketahanan pangan, pendidikan, dana darurat bencana kemudian juga ada energi. Kalau kita lihat secara ini lebih dekat lagi, kegiatan dari mulai kesehatan, kalau kita lihat sepiintas kesehatan itu ada dari mulai karantina, vaksin, insentif nakes, klaim rumah sakit, rumah sakit darurat, industri, farmasi dan alkes, dan berbagai pengadaan barang jasa di dalam testing dan *tracing*.

Kemudian juga di dalam kaitan Perlinsos, kita melakukan pengawalan pada berbagai jenis bantuan sosial, PKH, Bansos sembako reguler, PPKM, BST, subsidi listrik, subsidi elpiji, BPKS dan lain sebagainya. Dalam kegiatan dukungan UMKM, kami juga melakukan pengawalan dan pendampingan pada BPUM, penyerahan, pemberian kepada pedagang kaki lima, subsidi bunga, subsidi margin, penjaminan dan penempatan dana.

Di dalam pendidikan, kami juga melakukan pendampingan pada Program Indonesia Pintar, bantuan kuota internet, bantuan operasional sekolah, dan pada dukungan UMKM ya kalau kita lihat di layar ini ada beberapa kegiatan di dukungan UMKM, ada *eh* tadi sudah di ketahanan pangan *ya*, di ketahanan pangan, ada pupuk bersubsidi, *food estate* dan cadangan beras pemerintah.

Di bagian energi *ya*, kami melakukan pendampingan dan pengawasan pada energi baru terbarukan, produksi biodiesel dan infrastruktur listrik.

Selanjutnya kalau kita lihat lagi yang juga ruang lingkup daripada pengawasan kami di Tahun 2021, dalam pembangunan daerah *ya*, di sini ada kami melakukan pendampingan dan pengawasan pada dana transfer dan juga desa pada 74.921 desa, anggaran 79 triliun. Ada padat karya tunai desa, juga kami melakukan pengawasan terhadap penerimaan asli daerah dan terakhir pembangunan daerah prioritas.

Di dalam pengendalian kecurangan, *iya* terkait dengan kegiatan-kegiatan pengendalian korupsi, kami melakukan pengawasan investigasi, ada 435 kegiatan dan objeknya ada 343 objek pengawasan di kementerian lembaga, daerah dan badan usaha, dan akuntabilitas korporasi. Ini terkait dengan BUMN, BUMD, dan BLUD, kami melakukan 2.502 kegiatan pengawasan pada 108 BUMN, 765 BLUD, dan mencakup anggaran 820,38 triliun.

Di dalam infrastruktur *ya*, kami melakukan pengawasan evaluasi dan pendampingan pada pelaksanaan program strategis nasional di 201 proyek dan 32 kontrak diversifikasi, 10 program PSN. Dalam hal konektivitas program-program pemenuhan infrastruktur yang terkait dengan konektivitas, kami melakukan evaluasi reuvi terhadap 1.830 kontrak dengan total anggaran 42 triliun. Dan di dalam destinasi pariwisata superprioritas, kami melakukan pendampingan pada saat strategi proyek 5 kawasan dengan total nilai sebesar 23,40 triliun.

Demikian ruang lingkupnya yang saya kira sangat luas sekali dan izinkan kami menyampaikan hasil pengawasan kami di Tahun 2021. Seperti yang kita ketahui kami mendapat anggaran dari Bapak dan Ibu semua sebesar 1,4 triliun di Tahun 2021 dan uang itu kami gunakan untuk melakukan 11.712 penugasan pengawasan dan menghasilkan 3.150 rekomendasi strategis serta 758 tindak lanjut.

Dari sisi keuangan, kami bisa berkontribusi kepada keuangan negara sebesar 5.432 triliun yang terdiri atas 44,04 adalah penghematan

pengeluaran keuangan negara dari hasil verifikasi kami sebelum pembayaran, reviu-reviu tagihan-tagihan pemerintah dan sebagainya. Kemudian kami juga bisa menyelamatkan 6,43 triliun keuangan negara dan bisa meningkatkan optimalisasi penerimaan negara dari PNPB dari 3,85 triliun, totalnya adalah 54,3 triliun sebagai kontribusi kami kepada keuangan negara.

Selain yang bersifat yang bisa kita itu secara uang ya, kami juga melakukan banyak kali kegiatan pendampingan-pendampingan untuk memastikan bahwa proyek-proyek atau kegiatan tersebut bisa berjalan secara akuntabel. Beberapa hal yang penting yang kami ingin sampaikan adalah misalnya kami melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap 62 aksi strategis korporasi negara sehingga akuntabilitasnya bisa terjaga, diantaranya restrukturisasi bisnis PT Garuda Indonesia, penjualan 13 aset tetap PT Asuransi Jiwasraya, pemanfaatan aset Taman Mini Indonesia Indah, divestasi saham PPKI kepada PT MRT Jakarta dan lain sebagainya, sebagainya.

Kami juga mengawal 201 Proyek Strategis Nasional yang antaranya adalah Tol Trans Sumatera, Tol Cipali, LRT Sumatera Selatan dan LRT Jabodetabek. Ini ada reviu, ada evaluasi, ada pengawasan bahkan ada audit investigasi. Kemudian kami juga mengawal pemberian 25 juta paket bantuan UMKM agar efektivitas dan ketepatan sasaran ini bisa terjaga, kemudian 214 juta paket Bansos kami pastikan sampai kepada penerima yang berhak dengan melakukan perbaikan-perbaikan pada validasi data dengan Kementerian Sosial.

Kemudian 21,3 juta siswa terjaga aksesnya terhadap sekolah, kemudian ada 21.666 buah sekolah terjaga pembiayaannya operasionalnya dengan pengakuan pengawasan reviu kepada bantuan BOS, Dana BOS, kemudian insentif kepada 2.481.647 tenaga kesehatan yang kami lakukan evaluasi sebelum dibayar oleh pemerintah. Ini kami jaga supaya tepat sasaran dan tidak ada *fraud* di dalamnya.

Kemudian ada 417,17 juta dosis vaksin yang setiap harganya setiap ada transaksinya, kami reviu lebih dahulu sebelum dibayar oleh pemerintah. Kemudian ada penetapan harga tes PCR dan Antigen yang dipastikan akuntabel dan terjangkau oleh masyarakat. Kami juga menjaga 33,93 triliun klaim pembayaran rumah sakit, kemudian ada 11 K/L dan 137 Pemda yang kami bina untuk meningkatkan peningkatan sistem pengendali internnya. Ada 30 APIP kementerian lembaga, 230 APIP daerah yang ditingkatkan kapitasnya ke level 3.

Bapak-Ibu sekalian,

Itulah hasil pengawasan BPKP yang bersifat *keuangan* maupun yang bersifat *non keuangan*. Peran BPKP dalam kaitan akuntabilitas keuangan daerah sebagaimana yang disampaikan dalam surat Bapak-Ibu sekalian pada kami terkait dengan keuangan daerah, kami sampaikan bahwa pengawalan 14 keuangan kami lakukan mulai hulu, mulai Perencanaan hingga Pertanggungjawabannya.

Dalam proses perencanaan dan penganggaran kami melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran daripada pemerintah daerah, walaupun di Tahun 2021 kami akui hanya sedikit sekali karena keterbatasan anggaran yang kami punya.

Kemudian dalam pelaksanaannya ada pengawalan atas kualitas belanja dan Pengadaan Barang dan Jasa atau PBJ yang kami lakukan di dalam beberapa pemerintah daerah. Kemudian dalam proses pertanggungjawaban, kami mendampingi penyusunan laporan keuangan dan pendampingan revidi laporan keuangan di pemda-pemda sehingga bisa menjamin mereka menjadi WTP setelah diperiksa oleh BPK.

Kemudian tugas kami kedua terkait dengan akses keuangan daerah adalah melakukan penguatan terhadap APIP Pemda agar dapat mengawal akuntabilitas APBD. Kita melakukan peningkatan kompetensinya, melakukan pembinaan jabatan fungsional auditor, melakukan penilaian kapabilitas para auditornya dan melibatkan mereka dalam pengawasan yang dilakukan BPKP seperti vaksin, pemberian bantuan sosial dan sebagainya. Jadi, kami biasanya berkoordinasi secara nasional dengan APIP di daerah dalam beberapa kegiatan yang terkait dengan penanganan *Covid* dan pemulihan ekonomi nasional. Kami juga menyediakan layanan konsultasi dan bimbingan teknis melalui Tim yang tersebar di 34 perwakilan di setiap provinsi. Ini hampir setiap hari ada konsultasi dari teman-teman APIP di daerah-daerah.

Bapak-Ibu sekalian yang kami muliakan,

Dalam peningkatan pos penganggaran yang tadi kami sampaikan sebagai bagian tugas kita pada evaluasi 18 pemda yang kami lakukan terhadap 384 sasaran strategis dan 808 program serta 1.317 kegiatan, kami mendapatkan hasil evaluasi bahwa 80,81 program dirancang tidak tepat, tidak berhasil dan tidak terukur, artinya tidak selaras. 883,28% kegiatan dirancang tidak tepat, tidak berhasil, tidak terukur dan target tidak selaras.

Jadi kalau kami lihat dari angka sebesar 15,21 triliun yang kami evaluasi ada 27,79% daripada nilai tersebut tidak efektif dan tidak efisien. Ini berpotensi tidak akan berdampak, tidak yang ada manfaatnya dan tidak relevan belanjanya dengan kebutuhan masyarakat, ada 70,35% yang efektif dan efisien, dan ada 1,86% walaupun efektif namun tidak efisien. Ini adalah hasil sampel kami kepada 18 pemda yang bisa kita evaluasi.

BPKP melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah terkait bagaimana menyusun anggaran berbasis kinerja agar rancangan program kegiatan dan anggaran berfokus pada penyelesaian isu-isu strategis di masyarakat yang dirancang secara efisien. Ini kalau memang nanti kita bisa lakukan secara masif, Bapak-Ibu Komisi XI ya ini, ini akan sangat bermanfaat sekali karena nilainya sangat besar dan bisa saya kira-kira daerah bisa lebih bisa menggunakan anggarannya lebih efektif dan lebih efisien.



Bapak-Ibu sekalian yang kami memuliakan,

Dalam pengawalan atas Dana Desa ya kalau kita lihat dari Tahun 2016 sampai dengan 2021 jumlahnya terus meningkat dan ini besar sekali. Kami hanya bisa melakukan evaluasi Dana Desa pada 11.687 desa pada 234 kabupaten kota dan telah menghasilkan 3.409 rekomendasi. Berdasarkan hasil uji petik kami di lapangan terdapat ketidaksesuaian penggunaan dengan Permendes Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa 2021 yang disebabkan oleh 3 hal utama :

- 1) Kepala Desa dan perangkat desa kurang memahami peraturan prioritas penggunaan dana desa. Ini tentu yang diperlukan adalah lebih banyak sosialisasi dan pembinaan kepada desa-desa.
- 2) Dinas Pemberdayaan masyarakat desa tidak cermat dalam melakukan evaluasi atas Rancangan APBD Desa Tahun Anggaran 2021.
- 3) Adanya keterbatasan sumber pendanaan desa sehingga untuk menutupi kebutuhan masih menggunakan Dana Desa.

Ini tiga hal utama yang kami lakukan pada evaluasi 11.681 desa.

Bapak-Ibu sekalian,

Permasalahan dalam tata kelola desa, kami telah kumpulkan ada 2.525 secara total dan terbagi atas 10 permasalahan, dari mulai permasalahan penetapan rincian dana desa, pemenuhan persyaratan penyaluran dana desa yang tidak lengkap, kemudian ada 207 permasalahan perencanaan desa yang tidak (**rekaman kurang jelas/suara tidak jelas**), ada 98% permasalahan penyesuaian penggunaan dana desa dengan prioritas, ada 373 permasalahan penggunaan dana desa untuk BLTBD yang tidak tepat jumlah dan tidak tepat sasaran, ada 500 permasalahan lainnya ya, aspek perpajakan, administrasi dan lain-lain dan ini paling banyak. Kemudian 248 permasalahan tata kelola desa yang bersumber dari dana desa yang tidak tertib, ada 56 permasalahan rekonsiliasi sisa dana desa yang dari Tahun 2005 sampai dengan 2020 belum terselesaikan, ada 406 permasalahan pengadaan barang jasa di desa tidak sesuai dengan ketentuan. Inilah total permasalahan yang kami peroleh dari hasil evaluasi kami sebanyak 2.525 dan secara teknis ada 10 hal yang utama.

Kemudian hal lain lagi yang kami lakukan di dalam tata kelola Dana Desa adalah kami telah menyusun Siskeudes dan siswaskeudes sampai dengan Tahun 2021 kami laporkan sudah semakin banyak, sudah ada yang *online* 35% pada 25.370 desa, kemudian yang sudah menggunakan APB Desa dengan menggunakan Siskeudes sudah 93%. Kemudian yang melakukan penatausahaan dengan menggunakan aplikasi Sikeudes sudah 83%, sudah banyak sekali dan pelaporan sudah 81%. *Nah*, ini kami susun dengan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan sekarang bergabung Kementerian Desa ini sudah dilengkapi dengan sistem pengendalian intern, sudah mudah sekali menyusun laporan dan dokumennya kemudian disesuaikan juga dengan peraturan terbaru dan pada Tahun 2021 telah dilakukan pelatihan terhadap 34.148 desa yang tersebar di 33 provinsi, itu berarti baru setengahnya.

Kemudian Siswaskeudes untuk pengawasannya, baru digunakan pada 50 kabupaten kota dan 1.564 desa. Ini ada alat untuk pengawasan yang kami buat untuk memudahkan pengawasan di desa ( **rekaman kurang jelas/suara tidak jelas di menit 00:22:38**) lebih cepat lagi.

Kemudian kami laporkan juga pengawasan kami atas pengendalian korupsi ya, bahwa Tahun 2021 BPKP sudah melakukan sebanyak 1.159 pengawasan terkait dengan pengendalian korupsi dengan strategi dan *tools* pengendalian korupsi yang kami kembangkan sudah lama ....( **rekaman kurang jelas/suara tidak jelas di menit 00:23:14**) reuiu kapabilitas manajemen resiko korupsi.

Dari sisi edukasi, edukatif kami membangun kesadaran anti korupsi melalui sosialisasi anti korupsi, membangun masyarakat pembelajaran anti korupsi, membangun budaya anti korupsi dan juga melakukan diklat *workshop* meningkatkan kompetensi investigasi dari para seluruh aparat pengawasan internal pemerintah di daerah.

Di sisi represif, pendekatan terakhir untuk memberikan efek *deterrence* dan tindakan korektif, kami sudah melakukan audit investigatif, perhitungan kerugian negara, *aset tracing* dan *lost recovery*, *audit claims*, audit penyesuaian harga, evaluasi hambatan pembangunan, audit tujuan tertentu lainnya bidang investigasi dan juga digital forensik untuk membantu penanganan data-data *double* dan sebagainya, pada kegiatan-kegiatan perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi nasional.

Bapak-Ibu sekalian,

Demikian hasil yang kami sampaikan untuk hasil terakhir Tahun 2021. Untuk Tahun 2022 agenda pengawasan kami meningkat 50% dari yang sebelumnya, bahwa kami saat ini sudah mengembangkan dan menyusun agenda prioritas pengawasan Tahun 2022 yang nanti akan kami kirimkan ke Bapak-Ibu di DPR bukunya, yang mencakup 7 sektor, ada 29 tema dan topiknya naik 50% menjadi 99. Kalau tahun lalu cuma 50 watt ya, hampir 60 lah. Nah, ini kami kumpulkan, kami susun dengan melihat fokus Nota Keuangan APBN Tahun 2022 yang bapak tetapkan, bapak ibu tetapkan 2011, kemudian kami juga memperhatikan prioritas Bapak Presiden di dalam berbagai kesempatan rapat dan sebagainya, yang menjadi isu-isu strategis Bapak Presiden. Kami juga melihat fokus dari RKP Tahun 2022 yang sudah ditetapkan dan isu strategis lainnya dan kami kumpulkan ini menjadi pengawasan kami di Tahun 2022. Nanti ada 99 topik yang nanti akan kami izin untuk menyampaikan kepada bapak ibu secara detil. Dan untuk daerah, kami minta setiap Perwakilan BPKP untuk menetapkan, menentukan 2 topik utama, 2 topik utama yang menjadi prioritas kepala daerah yang di dalam provinsi yang bersangkutan, dan ini sudah terkumpul, kami susun menjadi agenda proses pengawasan daerah Tahun 2022 pada 34 provinsi.

Bapak-Ibu sekalian,

Sebagai tambahan mungkin untuk daerah ini akan berkembang lagi

nanti bahwa setiap provinsi akan ada 2 topik, ada dua proyek program yang akan kami awasi, termasuk juga kabupaten kota akan kami pilih dua. Ini akan ada kerjasama dengan Kejaksaan Agung untuk mengawal semua proyek-proyek strategis di seluruh pemda termasuk kabupaten kota dan provinsi sehingga nanti setiap program-program yang besar kami kawal supaya tidak, supaya program ini bisa berjalan lancar, akuntabel dan terjaga pelaksanaannya sehingga apa yang diharapkan bisa tercapai dengan baik, tapi untuk sementara, kami sudah susunkan dulu ini ada sambil terus pengawasan yang 2022, nanti juga izin kami akan sampaikan kepada bapak ibu sekalian.

*Nah*, kita masuk ke agenda pengawasan BPKP yang di pusat ada 7 sektor, 29 tema dan 99 topik. Ini 7 sektornya meliputi reformasi pengelolaan SDM, kemudian penguatan infrastruktur dan konektivitas, ini ada 14 topik, ada 14 pengawasan, akuntabilitas keuangan negara dan daerah, pemulihan ekonomi nasional, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan ekstrem dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Ini adalah 7 sektor yang menjadi fokus kami dan terdiri atas 29 tema. Kita lihat misalnya satu persatu.

Yang sektor pertama, reformasi SDM, ini terdiri atas Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial. Ini kita bisa lihat satu persatu di dalam rinciannya, ini hampir sama dengan yang tadi ruang lingkup kami di Tahun 2021 hanya tambahan-tambahannya. Jadi ada pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.

Kemudian yang kedua, di sektor B, penguatan infrastruktur dan konektivitas ini ada lima temanya. Ada Penguatan infrastruktur pelayanan dasar, Pembangunan perumahan, Infrastruktur PAM, Infrastruktur pengelolaan air limbah. Kemudian ada Penguatan infrastruktur untuk energi, jaringan gas, jaringan listrik, penguatan infrastruktur produktivitas, konektivitas dan mobilitas, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, tol dan sebagainya. Ini yang nilainya besar-besar semua bapak ibu sekalian. Kemudian pemerataan infrastruktur, akses teknologi informasi dan komunikasi, penyediaan BTS, penyediaan akses dan (***rekaman kurang jelas/suara tidak jelas***) dan jaringan internet untuk di daerah-daerah terutama, dan yang terakhir adalah optimalisasi pemanfaatan KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha.

Yang sektor ketiga adalah Siklus keuangan negara dan daerah. Ini pusat dan daerah. Yang pertama adalah peningkatan kualitas belanja pemerintah pusat. *Nah*, ini akan ada evaluasi terkait dengan penyerapan anggaran dan PBJ. Kemudian ada peningkatan *cost* belanja Pemerintah Daerah yang tadi sudah saya sampaikan, baru kami lakukan pada 18 pemda. Kami akan lebih luaskan lagi nanti, kalau memang nanti anggaran mencukupi. Perencanaan penganggaran pemerintah daerah, penyerapan anggaran, pengadaan barang jasa di daerah. Bagaimana kami nanti akan membantu Pemda untuk meningkatkan atau mengoptimalkan PAD-nya kemudian meningkatkan kualitas belanja pemerintah daerah sehingga benar-benar fokus pada sektor pendidikan dasar dan menengah, ini untuk permintaan

SDM-nya. Kemudian penguatan kualitas pemanfaatan dana otonomi khusus ya, Papua dan Papua Barat dan pemanfaatan APBD untuk (*rekaman kurang jelas/suara tidak jelas*) termasuk TKDD.

Yang keempat adalah akuntabilitas kekayaan negara dan daerah yang dipisahkan, ini nanti terkait dengan BUMN, BUMD dan sebagainya.

Bapak-Ibu sekalian,

Yang di sektor keempat adalah pemulihan ekonomi nasional yang mencakup stimulus dan dukungan terhadap UMKM, bantuan-bantuan pemerintah, fasilitas kredit yang diberikan kepada UMKM, kemudian stimulus dan dukungan terhadap korporasi. Ini yang masih sangat rendah sebenarnya *nih* di korporasi, penempatan dana penjaminan dan sebagainya. Kemudian kemudahan berusaha dan berinvestasi. Kemudian perizinan, stimulus, dan insentif perpajakan, kemudian perbaikan neraca perdagangan, pariwisata dan pembangunan energi berkelanjutan.

Pada sektor kelima yang terkait dengan ketahanan pangan, kami nanti akan melakukan pengawasan pada peningkatan produksi bahan pangan, peningkatan dukungan peralatan produksi pangan, kawasan sentra produksi pangan, *food estate* dan lumbung perikanan nasional. Kemudian peningkatan infrastruktur pangan dan tata kelola cadangan pangan pemerintah dan daerah.

Pada sektor yang keenam, penguatan pilar pemerintahan yang baik dan bersih, ini kami lakukan untuk melakukan pembinaan-pembinaan ya, kepada kementerian lembaga dan daerah termasuk juga melakukan kegiatan-kegiatan pengendalian kecurangan atau pengendalian korupsi, dan bagaimana kita melakukan deteksi-deteksi kecurangan lebih dini sehingga bisa mencegah di awal kegiatan ini.

Yang terakhir pada pengentasan sektor ketujuh, pengentasan kemiskinan ekstrim. Ini nanti kami melakukan pengawasan kepada kebijakan penurunan kemiskinan ekstrim pada tiga pilar. Pilar pembangunan perintah, konvergensi program anggaran sasaran, dan pemantauan dan evaluasi. Kemudian juga penurunan beban pengeluaran ya, pada PKH, kartu sembako, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, subsidi listrik sampai dengan bantuan subsidi upah.

Yang ketiga, peningkatan pendapatannya, kami masuk pada peningkatan pendapatan, kalau yang di sisi kiri ini bagaimana pengeluarannya yakni peningkatan pendapatannya, peningkatan akses permodalan, peningkatan aset produktif sampai dengan pengembangan potensi desa dan padat karya. Yang terakhir, percepatan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Demikian yang sifatnya yang semua rencana kegiatan pengawasan kami pada agenda di pusat yang ada di APBN. Di dalam tematik pengawasan daerah, tambahan, jadi, yang di daerah-daerah kami itu nanti akan ikut di

dalam pusat dan khusus yang ada di daerah yang bersangkutan, ini 68 topik yang kami sampaikan, 2 kami ambil dari setiap provinsi. Jadi, kalau kami bagi-bagi klasifikasikan ada 9 ada, ada, ada 8 jenis, 9 dari 68 itu bicara ketahanan pangan, kemudian 4 pengelolaan sumber daya manusia, ada 13 penguatan infrastruktur dan konektivitas, ada pemulihan ekonomi ada 6 program, ketahanan bencana dan lingkungan ada 11 dan optimalisasi PAD ada 7, pariwisata ada 9 dan pengembangan kawasan ekonomi dan negara ada 9. Ini agenda pengawasan daerah di Tahun 2022 yang tadi saya sampaikan, akan bertambah banyak sekali, akan menyusul setelah kami akan melakukan MoU dengan Kejaksaan Agung yang mungkin akan terlaksana beberapa waktu dekat ini.

Demikian Bapak-Ibu yang bisa kami sampaikan secara sekilas, hasil-hasil pengawasan kami di Tahun 2021 dan Rencana Kerja kami di Tahun 2022 yang tentu saja lebih banyak dan dukungan dari bapak ibu semua tentu sangat kami harapkan sekali terutama dukungan terhadap anggaran. Mudah-mudahan, kami sudah bicara sebenarnya dengan Ibu Menteri Keuangan, nanti akan bisa ditambah tapi mohon kelancarannya bisa bapak ibu jaga nanti pada saat ketemu dengan Ibu Menteri Keuangan karena keterbatasan anggaran ini berapa kegiatan yang di desa dan daerah terutama ini bisa terganggu cukup banyak karena seperti bapak ibu lihat tadi baru sedikit sekali yang bisa kami lakukan untuk daerah dan desa.

Demikian Bapak-Ibu yang bisa kami sampaikan di dalam Presentasi kami, saya kembalikan kepada Pak Ketua, Pak Fathan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang keliru, silakan Pak Fathan. Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih Pak Kepala, Pak Yusuf Ateh yang telah menyampaikan Capaian-capaian 2021 dan Agenda prioritas 2022 sangat luas spektrumnya, sangat dalam, dengan spektrum yang sangat, apa namanya, penting, ketahanan pangan, pariwisata, PEN, saya kira isu-isu yang sangat penting di tengah *recovery* ekonomi yang kita lagi *genjot* supaya kita bisa masuki tahap yang lebih bagus lagi.

Bapak-Ibu sekalian,

Tentu sesi berikutnya adalah Pendalaman, mungkin *respon* dan juga masukan-masukan kalau Pak Yusuf Ateh tadi minta dukungan anggaran, saya kira pasti teman-teman XI *concern* sekali karena memang tugasnya sangat berat sekali dan kita *kepengen* BPKB lebih terus kerja secara konsisten untuk apa namanya memberikan *support*, *audit* yang sehat.

Silakan, yang pertama tentu Fraksi PDI Perjuangan, silakan. Ada Pak Andreas atau Mbak Indah ?

#### **F-PDIP (INDAH KURNIA) :**

Iya, saya tapi saya menunggu apakah Prof Indrawan atau

Pak Andreas atau kawan-kawan yang lain, kalau tidak ada, saya akan...

**F-PDIP (Prof. HENDRAWAN SUPRATIKNO) :**

Pak Mustofa, Pak Mustofa, itu saya lihat, Pak Mustofa.

**F-PDIP (INDAH KURNIA) :**

Iya, saya juga siap.

**F-PDIP (Prof. HENDRAWAN SUPRATIKNO) :**

Yang mempunyai pengalaman bergumul dengan pengawasan di kabupaten.

**KETUA RAPAT :**

Pak Mustofa tidak, tidak, tidak bicara ini.

**F-PDIP (Prof. HENDRAWAN SUPRATIKNO) :**

Pak Mustofa tidak bicara, kalau begitu Bu Indah, silakan bu.

**KETUA RAPAT :**

Silakan Bu Indah, silakan.

**F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Terima kasih Prof, terima kasih.

Selamat siang, Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi XI yang keseluruhan hadir secara virtual dan tentu saja Bapak Yusuf Ateh beserta seluruh jajaran BPKP, katanya sudah berhasil menurunkan berat badan 20 kilo, semoga semakin sehat dan semangat ya.

**KEPALA BPKP (M. YUSUF ATEH) :**

Amin, amin Bu, dan itu tenis meja, tenis meja caranya

**F-PDIP (INDAH KURNIA) :**

Iya larinya lebih *kenceng* ya tapi hati-hati kakinya jangan sampai tergelincir seperti Gus Fathan.

Pak Yusuf, sebenarnya dari pemaparan yang disampaikan tadi semua, kami itu sangat bangga dan berharap banyak kepada BPKP dengan anggaran di 2021 yang 1,4 triliun pun bapak itu berhasil melakukan *save* terhadap..., dan menghasilkan banyak sekali karena kita tahu bahwa seluruh anggaran penggunaan anggaran belanja negara ini *kan* kita berharap

seluruhnya bisa sebesar-besarnya untuk kemanfaatan dan kesejahteraan rakyat. *Nah*, tadikan bapak sudah sampaikan dengan 1,4 saja kontribusi keuangan negara itu bisa mencapai 54,32 triliun dan kemudian menghasilkan 44 triliun penghematan pengeluaran keuangan negara 6,43 triliun. Penyelamatan keuangan negara selain menghemat juga menyelamatkan. Kemudian optimalisasi sampai dengan 3,85 triliun tetapi terakhirnya itu masih ada saja anggaran keuangan negara itu yang tidak tepat sasaran dan tidak bermanfaat, artinya tidak efektif, tidak efisien, itu sebesar 70,35 triliun.

Jadi, saya bayangkan kalau dengan anggaran yang lebih cukup dan kemudian pengawasan yang dilakukan juga akan lebih komprehensif tadi Gus Fathan bilang, apa namanya, bisa lebih kuat lagilah, apa, posisi dari BPKP, maka tentu kontribusi keuangan terhadap keuangan negara dan hasil-hasil terhadap penghematan, penyelamatan dan optimalisasi juga tentu lebih besar lagi itu kami berharap.

*Nah*, mengenai apa ini *ya*, apa, peran dan tugas BPKP di dalam melakukan pengawasan *akuntabiliti* daripada keuangan negara dari mulai hulu sampai hilir, tadikan dijelaskan, bukan hanya perencanaan tapi juga penganggaran kemudian pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Itu bapak atau BPKB, itu mampu mengawal akuntabilitas aksi strategis dari korporasi, itu salah satunya adalah *restru* terhadap *restru* bisnis Garuda dan lain sebagainya termasuk penjualan Jiwasraya dan lain-lainnya. Pokoknya apa yang dilakukan oleh *output* kerja dari BPKP ini cukup tinggi, tapi pada kesempatan kali ini saya ingin, tadi juga udah dipaparkan tentang 68 agenda *priority* untuk pengawasan daerah di 2022.

Kemudian bapak juga sempat menemukan permasalahan dalam tata kelola dana desa sampai 2.525 yang di-*simplify* dalam 10 kelompok permasalahan, tetapi Pak Yusuf dari dulu sampai sekarang saya lihat permasalahan yang ada di daerah itukan dalam tanda kutip *ya* tetap, itu-itu saja. Jadi, ketidakpatuhan, kemudian ketidaktahuan terhadap sistem dan lain sebagainya. *Nah*, saya hanya berharap apakah ada resep yang sangat jitu dengan minimnya anggaran kita tahu bahwa penerimaan negara tidak sebanding dengan belanja negara khususnya untuk Perlinsos, Kesehatan apalagi kepada Pendidikan dan seterusnya, infrastruktur, semua kita butuhkan.

Kira-kira apa, kira-kira *ya*, cara yang paling efisien dan efektif sehingga temuan dan rekomendasi tidak itu-itu saja tetapi penyebab dari tidak maksimal dan ketidakmanfaatan anggaran keuangan pusat maupun daerah itu benar-benar yang *worth it* atau berkualitas, *gitu loh*, pak. Penyebabnya itu jangan yang, menurut saya agak sedikit sepele. Bapak tadi juga sebutkan tentang pengawasan terhadap pengendalian kecurangan. *Nah*, berarti *mindset-mindset* seperti itu masih terjadi.

Bapak juga membuka apa konsultasi, layanan konsultasi dan bimbingan teknis melalui Tim yang tersebar di 34 provinsi. *Nah* itu, hal-hal seperti itu apakah terus di-*update* dan di-*charge* sehingga mereka benar-benar melaksanakan tugasnya bukan rutinitas.

Kita ketahui *ya*, selama ini sebagai alat Pemerintah, BPKP sangat membantu Pemerintah untuk memantulkan artinya mencerminkan realisasi penggunaan keuangan negara di setiap KL, Pemda, BUMN, BUMD, namun bila kita semata-mata menggunakan pendekatan audit yang sifatnya *pause*, itu apalagi bila objek pemeriksaannya terbatas tentu preventifnya, pencegahan terhadap penyalahgunaan itu tidak akan mampu diantisipasi preventifnya. Apakah BPKP perlu mengembangkan sistem misalnya *ter-connect*, apa, terhubung antara Pemda, BUMN, BUMD kemudian realisasinya, proses *auditing*-nya sehingga tahapan ini bisa menjadi semacam gugus kendali yang tujuannya mampu memberikan *early warning-lah* pak, *early warning* preventif tadi terhadap kuasa pengguna anggaran di masing-masing KL Pemda, BUMN, BUMD tanpa menghambat keluwesan gerak, iya keluwesan, keleluasan atau keluwesanlah kinerja dari pada kinerja KL, Pemda, BUMN, BUMD.

Kemudian kita melihat bahwa ini pak tentang apa *ya*, saya pikir tadi saya catat tentang ini pak, gambaran objektif dari BPKP apa yang bisa disampaikan kepada kami atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh pemerintah khususnya bukan jalan tetapi menyangkut upaya mengurangi impor pangan dan energi, itu Pak Yusuf. Sebab dua ini yang selama ini berkontribusi besar dalam mengoreksi kinerja fiskal kita, sekaligus upaya untuk perbaikan tata kelola sektor pangan agar sistem logistik nasional kita bisa melakukan mitigasi bila memang ada potensi persoalan yang akan muncul terkait masalah-masalah pangan di rakyat kita.

Selamat bertugas Pak Yusuf, kawan-kawan BPKP semuanya, tugas yang sangat mulia dan semuanya bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Semoga di masa pandemi, pasca pandemi nanti kita semua boleh memberikan lebih lagi manfaat bagi bangsa dan negara kesatuan yang kita cintai bersama.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Merdeka !

**KETUA RAPAT :**

*Wa 'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Merdeka !

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

Gus, izin gus, pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Baik, siap.  
Siap, Pak Eriko.



**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

Iya, Pimpinan. Itu tadi suaranya saya dengar memang Ibu Indah, tapi suara saja kan tidak bisa menjamin apa ?

**KETUA RAPAT :**

Aslinya.

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

Aslinya, kita, kita harus apa lagi dalam proses *zoom* ini, ini harus, harus jelas pimpinan, apakah itu Bu Indah atau...?

**KETUA RAPAT :**

Itu bukan Ibu Indah ya ? Ibu Indah *enggak* itu tadi ?

**F-PDIP (Prof. HENDRAWAN SUPRATIKNO) :**

Verifikasi dulu, Pak Eriko, ya ?

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

Hah ?

**F-PDIP (Prof. HENDRAWAN SUPRATIKNO) :**

Diverifikasi, otentitasnya ?

**F-PDIP (INDAH KURNIA) :**

Baik iya saya ini lagi dalam posisi yang,  
Baik Pak Eriko, saya akan tampilkan walaupun,

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

Iya.

**F-PDIP (INDAH KURNIA) :**

Boleh.

**KETUA RAPAT :**

Aku pikir bukan Bu Indah tadi ya ?

**F-PDIP (INDAH KURNIA) :**

Baik, saya akan tampilkan, meskipun mungkin tidak layak dilihat tapi, saya, saya ingin ini menampilkan wajah tercantik terbaru kemarin di Bali itu tapi *ya* sekarang saya dalam posisi yang seperti ini, itu *background*-nya itu Gus karena posisinya ini.

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

*Nah, gitu dong.*

**F-PDIP (INDAH KURNIA) :**

Terima kasih Pak Eriko. *Here I am.*

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

Terima kasih, Bu Indah.

**F-PDIP (INDAH KURNIA) :**

Terima kasih, *thank you.* Terima kasih, Pak Eriko yang ganteng.

**KETUA RAPAT :**

Ini baru jelas Bu Indah.

**F-PDIP (INDAH KURNIA) :**

Itu *background*-nya cantik soalnya, saya *kepingin* tampak cantik di Hari Senin, di depan Pak Yusuf.

**F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.) :**

Memang benar Pak Eriko harus jelas.

**KETUA RAPAT :**

Harus jelas *nggak* boleh abu-abu *dong.*

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

*Nggak* boleh, *nggak* boleh Gus, betul.

**KETUA RAPAT :**

Baik, Fraksi PDI Perjuangan sudah selesai.

Fraksi Golkar, silakan. Ada Pak Misbakun, ada Pak Sarmuji, ada Pak Mekeng.

**F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.) :**

Saya dulu mungkin, kalau *nggak* ada yang *iniin*, pak.

**KETUA RAPAT :**

Silakan Misbakun, sesama alumni STAN.

**F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.) :**

Terima kasih.

Makasih Pak Ketua, Pak Fathan yang memimpin rapat.

Yang saya hormati Pak Ketua peserta seluruh Anggota Komisi XI yang hari ini mulai rapat secara daring dan Pak Heri yang rapat secara fisik di sekretariat. Ini Pak Heri ini gagah berani.

**F-P GERINDRA (HERI GUNAWAN, SE.) :**

Siap.

**KETUA RAPAT :**

Udah *booster* 4 kali dia.

**F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.) :**

Yang saya hormati Bapak Kepala BPKP Pak Yusuf Ateh beserta Sestama tadi saya melihat Pak Sestama dan para deputi yang saya hormati beserta jajaran.

*Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,*  
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

Ada beberapa pertanyaan saya pak terkait dengan pengemasan ini sebagai pengawas pemerintah inspektoratnya pemerintah di tingkat pusat ini BPKP ini perannya sangat luar biasa makanya kalau BPKP bekerja dengan sangat baik seperti ini saya yakin anggarannya pasti akan sangat sulit didapatkan dari Kementerian Keuangan, saya yakin, yakin itu karena, karena tidak ada orang yang suka diawasi seperti dengan cara seperti ini, karena kalau orang diawasi dengan cara kerjanya BPKP terus kemudian APBN *diblejeti* kata orang Surabaya, kata Bu Indah itu, diperiskop dan di-*summing* sampai ketahuan efektivitasnya hanya 70%, pasti yang menyusun anggarannya marah pak, pasti pak dan pasti *nggak* suka.

*Lah* bayangkan tadi Pak Ateh bisa menyimpulkan bahwa efektivitas anggaran itu cuma 70%, selebihnya itu ada 27 sekian persen, ini tadi disebutkan sama Pak Ateh. Ini saya ulangi lagi, ada 27,79 dan 1,8-nya itu efektif namun tidak efisien sisanya 70, ini dari sisi penggunaan pak. Mata rantai anggaran itu kan panjang, belum orang yang kemudian calo-calo anggaran yang memposisikan kemudian potong memotong anggaran, ini hanya dari sisi penggunaan pak, berarti dulu tesisnya Bapak Sumitro Djohadikusumo bahwa 30% itu ya penyelewengan, pak. Kalau ini, jadi tidak efisien pak. Penyelewengannya 70%, tidak efisiennya 30%, terus yang untuk rakyat berapa persen itu ? *Lah* saya yakin dengan apa yang disampaikan oleh bapak seperti ini, saya yakin kita seluruh Komisi XI ini, kalau mau memperjuangkan apa yang disampaikan oleh BPKP, *enggak* akan suka pemerintah pak, bagaimana caranya supaya BPKP ini kerjanya tidak efisien juga, makanya anggarannya dipencet pak, anggarannya pasti dipencet pak. Ini kalau menurut saya dalam pandangan saya.

*Lah* ini Pak Ateh, kami ini politisi, pak.

**KEPALA BPKP (M. YUSUF ATEH) :**

Terima kasih.

**F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.) :**

Pasti akan memberikan dukungan politik yang kuat, bagaimana pengawasan internal pemerintah itu berjalan efektif, efisien seperti yang bapak lakukan dan BPKP ini dengan penguatan, penguatan fungsi pengawasan seperti ini kita dorong untuk melakukan kerja dengan sebaik-baiknya. *Nah*, kalau urusan anggaran pak dari zaman dahulu kala kita ini selalu kalah pak, dan tidak berhasil dan saya yakin pak, *omongan* Komisi XI yang menjanjikan sama bapak, saya yakin *nggak* bakalan digubris deh, *nggak* bakalan digubris. Kalau saya jadi bapak, saya cuma satu pak, kita tunjukkan kepada kementerian. Kita minta langsung kepada Presiden, "*Pak, saya menjalankan tugas yang begitu banyak tapi anggaran saya kurang memadai, kurang memadai. Saya bisa menemukan banyak temuan seperti ini tetapi saya kurang mendapatkan daya dukung dari sisi anggaran. Kalau seandainya, saya mendapatkan anggaran seperti ini, seperti ini, seperti ini, saya akan bisa membuat APBN itu lebih efektif, lebih efisien, penggunaannya itu sesuai dengan tujuan kita bernegara yaitu well stated.*"

Dan kemudian itu, saya tahu pak, saya bayangkan BPJS itu, BPJS Kesehatan, hanya karena BPKP melakukan verifikasi data saja, 27 juta yang dikatakan hanya dari pengecekan NIK saja pak, itu *bikin* ribut sedunia, pak. BPKP melakukan itu pak, hanya *mengecek* itu, apalagi kalau kemudian secara mikroskopik, kemudian bisa mendesain perencanaan apa itu pengawasan yang begitu dalam pelaksanaan begitu detail dalam pelaksanaan APBN, saya yakin BPKP akan lebih banyak menemukan. *Nah*, itu dari sisi APBN.

Saya ingin menanyakan beberapa hal Pak Ateh, terkait apakah BPKP dilibatkan pak dalam penyusunan program di IKN pak karena IKN ini bagi saya sangat penting untuk kemudian diperkuat ada peran BPKP di sana karena kalau ada peran BPKP yang sangat kuat maka tesis orang-orang yang meragukan pemindahan IKN ibukota ke Penajam Paser Utara sana pak ke Ibukota Nusantara itu bisa diyakinkan bahwa di sana ada peran pengawasan yang sangat kuat. Orang selalu menceritakan hal-hal yang sangat yang menolak inikan, selalu menceritakan hal-hal misalnya proyek, inilah ini tapi kalau BPKP saya akan dilibatkan, saya yakinlah nanti akan argumentasi-argumentasi yang sifatnya kuat dari sisi pengawasan itu bisa memperkuat bahwa pemerintah ini memindahkan IKN itu ke Kalimantan sehingga narasi-narasi yang selama ini dibangun bahwa di sana akan terjadi permainan proyeklah, permainan anggaranlah, permainan ini, permainan itu, kerusakan lingkungan dan sebagainya, itu bisa diredam dengan BPKP yang lebih kuat.

Kemudian yang berikutnya pak, saya mengenai dana desa. Dana Desa ini pak, saya selama ini bisa mendapatkan akses ketemu kepala desa di daerah pemilihan saya karena peran BPKP, pak. Beberapa tahun terakhir ini, saya *nggak* bisa sosialisasi dana desa, pengawasan dana desa karena memang anggaran untuk itu sudah *nggak* ada pak. Kalau Pak Eriko *nggak* apa-apa pak karena dapilnya *nggak* ada desanya, pak. Dapilnya Pak Eriko ini kota semua pak, beliau turunnya ke Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat dan luar negeri. Kalau saya *udah nggk* bisa sosialisasi sama BPKP, pak. Saya *nggak* bisa lagi mengundang kepala desa, memanggil kejaksanaan, manggil polisi untuk meyakinkan bahwa pengelolaan dana itu (***rekaman kurang jelas/suara tidak jelas***), kalau kita kan lagi *nggak* bisa pak karena anggarannya *nggak* cukup. Pak Heri juga pernah protes sama saya, sekarang sudah *nggak* bisa jalan sama BPKP karena anggarannya *nggak* ada, itu. *Lah* sama-sama Pak Heri, saya bilang, *nah* sekarang ini pak, apakah masih memungkinkan kita untuk melakukan sosialisasi berkaitan dengan dana desa ini ? karena dana desa ini adalah proyek, apa itu, afirmasi keberpihakan pemerintah untuk merealisasikan, merealisasikan Undang-Undang Desa di mana titik tumpu pembangunan itu adalah di desa pak. *Lah* inikan sangat penting pak untuk selalu kita sampaikan kepada masyarakat dari sisi pengawasan, disitulah peran pentingnya BPKP itu juga kita sampaikan kepada masyarakat bagaimana BPKP membangun Sistem Kuedes (Sistem Keuangan Desa) dari 01 menjadi 02 dan sebagainya, dan itukan membangun *governance* apalagi *kan* sekarang dana desa itu 1 bagian di APBD yang mempengaruhi Opini WTP dan sebagainya pak, dan inikan menjadi sangat penting pak, peran kita di daerah pemilihan kita masing-masing.

Kemudian pak yang berikutnya, tadi bapak bicara soal pemulihan ekonomi nasional pak. Pemulihan Ekonomi Nasional ini pak, saya kaitkan dengan PMN. Pak Ateh kemarin dalam saat membahas PMN ini, bapak lagi apalagi bicara Tol, soal pengawasan Tol Sumatera dan sebagainya yang agak aneh bagi saya pada saat itu adalah Menteri Keuangan berbicara soal cadangan PEN, terus kemudian berbicara soal SiLPA SAL. Pada saat SAL itu sedang berjalan, APBN-nya berjalan. SiLPA atau SAL itukan baru kita bicarakan setelah Tanggal 31 Desember, baru kita mengatakan bahwa APBN itu mempunyai SiLPA dan APBN menurut Undang-Undang Keuangan

Negara, kan tidak boleh direncanakan untuk mempunyai SiLPA. *Nah*, saya ingin tahu ini, pak.

Kemudian setahu saya PMN-nya Utama Karya, itukan saya setuju dengan PMN ini, saya setuju tidak sedang mempermasalahkan PMN-nya terhadap Utama Karya tetapi saya ingin hanya ingin di internalnya Pemerintah itu apa *sih* sebenarnya terjadi ? kenapa penggunaan dan istilahnya itu berbeda-beda ? ada cadangan PEN yang..., padahal setahu saya, PEN itu adalah bagian dari APBN tetapi kemudian ada istilah SiLPA dan penggunaan cadangan PEN untuk PMN, di saat APBN sedang berjalan. *Nah*, apakah pertanyaan saya, apakah yang tadi bapak katakan bahwa bapak ikut dalam pengawasan Tol Sumatera ini ? apakah bapak tahu terhadap permasalahan itu ? karena setahu saya, bapak kan juga dilibatkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang untuk melakukan reuiu untuk sebelum dilakukan pemeriksaan oleh BPK ? *lah* itu terjadi di Tahun 2021 pak, yang nanti tentunya dilakukan pemeriksaan di Tahun 2022.

Terkait dengan Proyek Strategis Nasional Pak, Proyek Strategis Nasional ini saya ingin pak melihat mulai dari perencanaan, contoh pak, perubahan skenario, perubahan skema, perubahan skema, contoh kereta api cepat yang tadinya *full* pembiayaan swasta murni kemudian melibatkan APBN. Perubahan skema ini apakah melibatkan BPKP ? untuk melakukan reuinya pak, apakah melibatkan BPKP ? dan saya melihat ada banyak sekali skema-skema yang berubah di sana, itu tidak cuma yang berkaitan dengan kereta api cepat. Contoh tadi bapak bicara soal dengan Garuda, Garuda ini yang bapak awasi itu PMN terakhir atau secara keseluruhan ? Garuda itu kenapa menghadapi situasi ketidak pastian seperti saat ini ? itu, apakah hanya itu atau hanya PMN terakhir yang waktu itu 5 triliun ? kemudian di dalam bentuk pemerintah memberikan penjaminan dan sebagainya atau hanya itu ? karena setahu saya, tadi bapak cerita sangat detail. Bapak bicara tentang forensik audit, bicara tentang bagaimana bapak menelusuri seluruh arus itu, sampai detail bapak menyampaikan *gitu*, karena kalau bapak bisa melakukan itu semua dari sisi preventifnya pemerintah, itu sangat menarik pak, menarik sebagai pembanding terhadap apa yang dilakukan oleh BPK. Karena BPKP ini setahu saya, BPK perjuangan pak, *gitu*, karena kan nanti akan ada dua, satunya BPK dan BPK Perjuangan. Ini nanti akan memberikan sebuah pembanding yang seimbang terhadap opini-opini pemeriksaan dan kemudian pembanding yang seimbang dari sisi pemerintah terhadap audit forensik itu karena kalau penguatan dari sisi bapak, pengawasan dari pemerintah sudah begitu detail dan begitu dalam, maka sisi pencegahannya itu harusnya datang dari bapak, sisi itu.

Pencegahannya dari bapak, baru yang lainnya melakukan upaya kalau pencegahannya tidak dilakukan dan itu mempunyai nilai efek kerugian negara yang sangat signifikan maka baru APH-lah yang bertindak dan tentunya ini akan menjadi temuan yang sangat signifikan dan serius untuk dibawa ke BPK pak, disampaikan bahwa, bahwa yang menemukan kami untuk disampaikan kepada BPK supaya menjadi catatan pemeriksaan, itu pak. Hasil pengawasan menjadi catatan hasil pemeriksaan dan kemudian penegakkan hukumnya di aparat penegak hukum.

Itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Ketua, Pak Fathan, yang hari ini kelihatan sangat alim pakai kopiah *enggak* tahu, ini kelihatan sangat NU, kelihatan sangat NU padahal sudah NU Pak Fathan ini, karena *nggak* ada di pengurus *kayaknya*.

Terima kasih Pak Ketua, terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

*Wa 'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Misbakun, luar biasa. IKN, PMN, dan saya kira banyak isu memang karena BPKP ini spektrumnya luas sekali.

Baik, selanjutnya Fraksi Gerindra, Pak Hergun yang nunggu di ruangan sendirian.

**F-P GERINDRA (HERI GUNAWAN, SE.) :**

Terima kasih Ketua.

Ketua dan kawan-kawan Komisi XI yang saya hormati,  
Pak Yusuf Ateh beserta seluruh jajaran,

Mohon izin saya hadir di kantor, kebetulan ada agenda yang harus dihadiri secara fisik.

Satu langkah terobosan baik, saya pikir kepada Pak Yusuf Ateh karena adanya nota kesepahaman antara BPK dengan BPKP yang baru-baru Bulan September lalu ditandatangani, terkait dengan peningkatan ataupun peningkatan penyelenggaraan pengawasan internal oleh BPKP dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan oleh BPK. Satu catatan barangkali bahan yang disampaikan, saya coba buka dan melihat di dalamnya. Kami belum menemukan Pak Yusuf, terkait masalah capaian anggaran PEN yang dialokasikan mencapai 744,77 triliun, tercatat hanya sebesar 658,6 triliun atau 88,4% dari pagu. BPKP sendiri melakukan pengawasan pada 5 klaster yang tersedia tentunya, Kesehatan, Perlindungan Sosial, Program prioritas, Dukungan UMKM dan korporasi serta Insentif usaha, namun kalau melihat catatannya, kami menemukan hanya 39 subklaster yang diperiksa atau alias 65%. Sementara itu, BPKP menginformasikan dalam PAL jawabannya, yang pertanyaan RDP 7 Februari 2022 bahwa sasaran strategi khususnya nilai pengeluaran daerah telah melebihi capaian 159,9%. *Nah*, sementara ruang lingkup pemeriksaannya kan berbeda. Kami ingin tahu Pak Yusuf Ateh, seberapa besar porsi pengawasan PEN terhadap total pengawasan keuangan negara Tahun 2021 ? apakah target memang ditentukan sekian persen tumbuh dari capaian tahun lalu dari besaran APBN 2021 ? terus apakah klaim dari BPKP dapat diandalkan di tengah keterbatasan lingkup pengawasan yang disampaikan tadi ?

Berikut yang ingin kami coba lihat, BPKP melakukan pengawasan perencanaan dan penganggaran daerah tentunya ini mengacu kepada salah satu dasar pembentukan Undang-Undang HKPD bahwa pemerintah dan BPK menemukan bahwa sumber pendapatan sebagian Daerah Otonomi Baru atau DOB masih sangat mengandalkan dukungan APBN dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hal ini tentunya berdampak pada rencana pemekaran daerah baru atau penggabungan daerah otonomi yang kiranya berpotensi untuk digabungkan. Kami ingin melihat ini Pak Ateh karena pada saat ini di Baleg ini sedang disampaikan usulan dari Komisi II terkait dengan masalah undang-undang beberapa provinsi yang sudah kadaluarsa yang dibentuk pada masa Republik Indonesia Serikat bahkan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, yang tentunya sudah *out of record, off out date*.

*Nah*, tentunya mungkin BPKP pada saat melakukan pemeriksaan juga bisa mengetahui dasar undang-undang daerah mana saja yang memang sudah *out of date* ataupun perlu diperbaiki karena tentunya hal ini juga berbeda pondasi untuk pemeriksaan yang nantinya karena seiring dengan perkembangan zaman.

Mungkin ini sebuah catatan yang harus diperhatikan Pak Yusuf. *Nah*, kami ingin mengetahui dengan terkait dengan Undang-Undang HKPD dan DOB, seberapa jauh asesmen atau evaluasi yang BPKP telah melakukan atas daerah-daerah tertentu yang memiliki kemandirian fiskal, baik yang berpotensi untuk dimekarkan seperti itu ?

Hal berikut yang mungkin ingin coba kami tanyakan, kami juga ingin tahu seberapa besar *sih*, seberapa strategis, *gitu*, langkah pengawalan sasaran BPKP dalam mengoptimalkan dan mendorong rekomendasi dari catatan-catatan yang sudah disampaikan oleh BPKP. Tentunya ini sebaiknya ditindaklanjuti oleh pemerintah atas rekomendasi BPKP juga menjadi indikator capaian kinerja BPKP. Padahal kita ketahui bersama anggaran BPKP nampaknya tidak akan mencukupi namun dengan adanya rekomendasi ini, harapan kami ingin menjadi indikator capaian kinerja untuk BPKP.

Pak Yusuf Ateh, kami juga ingin mengetahui terkait dengan BPKP yang mencatat telah melakukan pengawasan terhadap 1.133 BUMD dan 765 Badan Usaha Layanan Daerah atau Badan Usaha Layanan Daerah (BLUD) yang pada dasarnya BPKB melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik secara rekomendasi maupun catatan tapi mungkin akan lebih baik kalau rekomendasi ataupun perbaikan atau pendampingan perbaikan tata kelola ini harus dibutuhkan begitu dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. *Nah*, ada beberapa PEN tadi yang *nyambung*, bagaimana evaluasi dan sinergi BUMN dengan BUMD terutama terkait pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur atau yang strategis nasional bahkan program PEN itu sendiri di daerah ? *nah*, kami belum mendapat gambaran terkait masalah ini, Pak Yusuf Ateh.

Hal berikut terkait bahan yang disajikan oleh BPKP seperti pada *Slide* 4 terkait dukungan UMKM. Dijelaskan bahwa BPUN itu ada 12,8 juta penerima, di mana BTPKLW jumlah target itu 1 juta UMKM, sementara



subsidi bunga dan penjaminan kami tidak melihat berapa targetnya, seperti itu. Namun, pada *slide* 6, yang bahan BPKP, tertulis bahwa 28,5 juta paket bantuan UMKM ini dipastikan ketepatannya sementara di Jawa dengan pertanyaan RDP Halaman 5 itu tertulis klaster dengan capaian paling rendah adalah klaster UMKM dan korporasi dengan realisasi belanja hanya mencapai 45,79% dari alokasi APBN, begitu *loh*. *Nah*, ini agak sedikit membingungkan Pak Yusuf Ateh dari bahan yang disajikan oleh BPKP. Kami mohon penjelasan program apa *aja* yang serapannya rendah sedangkan pada *Slide* 4 tertulis program penempatan dana juga 30,25 triliun. Apakah program itu terserap secara optimal atau tidak ? begitu. Kami ingin mengetahui lebih jauh.

Terkait di *Slide* 6, Pak Yusuf Ateh, tertulis bahwa PSN terkawal akuntabilitasnya antara lain meliputi Tol Trans-Sumatera dan Tol Cipali. Mungkin ini menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Misbakun tadi, sementara pada awal 2022 terjadi kecelakaan di Trans Sumatera Palembang Kayu Agung, Pak Yusuf Ateh, di mana penyebab kecelakaan karena pengemudi menghindari lubang di Jalan Tol yang akhirnya harus menabrak pembatas jalan, seperti itu. Sementara di satu sisi Trans Sumatera ini merupakan salah satu program ataupun proyek strategis nasional yang didukung oleh anggaran negara. Kami ingin mengetahui sampai sejauh mana pengawasan BPKP terhadap proyek tersebut terkait dengan aspal yang mengelupas yang akhirnya menimbulkan jalan berlubang ? mungkin mohon dijelaskan juga *nih* kualitas aspal yang dijelaskan pada proyek tersebut dan bagaimana langkah BPKP agar kejadian serupa tidak terulang pada ruas-ruas tol lainnya yang merupakan dari bagian proyek strategis.

Di *Slide* 14, dijelaskan mengenai agenda prioritas BPKP 2022 di mana reformasi pembangunan SDM diantaranya soal pendidikan, kita ketahui Pak Yusuf Ateh di dalam APBN atau alokasi anggaran Pendidikan itu 20% dari APBN, pada Tahun 2021 anggaran pendidikan dialokasikan kurang lebih 550 triliun, namun APBN kita disebutkan tidak terealisasi untuk pembiayaan pendidikan itu hanya 37,4 triliun. Kami ingin penjelasan *nih* kepada Pak Yusuf Ateh beserta jajaran dari BPKP, anggaran pendidikan sebesar 550 triliun tersebar di berbagai kementerian juga TKD *nih*, berapa persen realisasinya jika tidak bisa terealisasi 100% ? tentunya kita pahami hal tersebut merupakan temuan karena tidak sesuai dengan amanat konstitusi. *Nah*, terkait agenda BPKP di 2022, bagaimana strategi pengawasan BPKP terhadap anggaran pendidikan agar tetap sasaran dan dapat diserap 100% ?

Saya pikir mungkin itu yang sedikit banyak saya coba tanyakan kepada Pak Yusuf Ateh beserta jajarannya. Demikian, terima kasih pimpinan.

#### **KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Hergun.

Luar biasa Pak Yusuf Ateh ini responnya dari proyek strategis nasional, UMKM, Cipali dan lain sebagainya. Saya kira memang BPKP tugasnya audit-audit yang saya kira sangat menarik sekali.

Baik, Pak Satori sudah tidak sabar, tadi sudah siap di laptop, katanya *gitu*.

Silakan, Pak Satori Nasdem.

**F-P. NASDEM (SATORI, S.Pdi., M.M.) :**

Siap, terima kasih Pimpinan Rapat, Pimpinan Komisi Gus Fathan.

Bapak Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati, Hadir mitra kerja pada hari ini, Pak Kepala BPKP RI, Bapak Yusuf Ateh kemudian Sekretaris Utama BPKP, Pak Ernedi Sudarmanto dan para Deputi yang lain.

Sedikit *nih*, Pak Kepala BPKP Pak Yusuf Ateh, saya menyampaikan aspirasi dari dapil saya dulu. Yang pertama, beberapa tahun kemarin ya, tahun kemarin itu ada kejadian tindak pidana korupsi di salah satu dinas di Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, namun barang bukti tersebut dikirim kepada BPKP Jawa Barat untuk dinilai kerugian negaranya, tetapi sampai 1 tahun kemudian itu kerugian negaranya belum turun-turun, hasil penilaian dari BPKP. Dengan demikian, dengan keterlambatan perhitungan penilaian kerugian negara tersebut selama 1 tahun maka kejaksaan negeri sebagai penyidik itu terlambat dalam pengiriman perkara ke pengadilan sehingga kejaksaan tersebut meminta auditor independen untuk kerugian negara. *Nah*, mohon mudah-mudahan supaya kegiatan-kegiatan hal seperti ini di tingkat bawah supaya lebih diteliti lagi agar jangan sampai merugikan salah satu institusi yang menjadi akhirnya kelihatan bahwa penanganan perkara itu adalah lambat.

Itu barangkali Pak Kepala BPKP, Pak Yusuf Ateh.

**KEPALA BPKP (M. YUSUF ATEH) :**

Tapi terakhir sudah pak, sudah.

**F-P. NASDEM (SATORI, S.Pdi., M.M.) :**

Iya.

Kemudian yang kedua, menurut data dari Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin itu per akhir Desember kemarin, total masyarakat yang sudah kita suntik dosis lengkap itu dengan *full* vaksinasi itu mencapai 108.412.316 orang atau 40,12% tetapi capaian vaksinasi ini sebenarnya tidak merata di semua provinsi. Pada *slide* Halaman 4, disebutkan bahwa nilai pengadaan vaksinasi sebesar 39,43 triliun dengan dosis 417,75 juta, bagaimana BPKP mengawasi penggunaan anggaran pengadaan vaksinasi yang belum merata dilakukan sampai ke daerah-daerah ? bagaimana jika terjadi penyalahgunaan dana tersebut ? bagaimana capaian realisasi pengadaan vaksinasi ? mohon penjelasannya Pak Kepala BPKP karena berbeda dengan data dari Menkes ini berlaku juga untuk dana-dana *Covid-19* yang lain itu, harus benar-benar diawasi penggunaannya.

Kemudian yang kedua Pak Ateh, pada *slide* Halaman 10, permasalahan dalam tata kelola Dana Desa ada 2.525 kasus dengan berbagai macam permasalahan, masih banyak sekali dan ini selalu berkelanjutan, dan selalu ada. Bagaimana sinergi BPKP dengan Kementerian Desa dan pemangku kebijakan lain terkait pengawasan dan perbaikan sistem dan strategi di Tahun 2022 untuk minimal mengurangi kasus tersebut ? Apakah BPKP hanya menerima laporan tanpa tindak, lah tidak ada tindak lanjut memberantas atas kasus tersebut ? ada juga pengawasan dari Kementerian Desa di Satgas *Kemendes.co.id*, lalu apa gunanya pengawasan, pengawas tersebut kalau masih banyak kasus-kasus permasalahan dana desa. Mohon dijelaskan.

Kemudian yang ketiga Pak Ateh, pada *slide* Halaman 21 dijelaskan mengenai pengentasan kemiskinan ekstrem, kemarin rapat dengan Menteri Keuangan sudah dijelaskan bahwa penduduk miskin ekstrem Tahun 2021 adalah 9, adalah 10,86 juta. Kemudian di Bappenas juga ada aplikasi SEPAKAT. Jadi sudah banyak usaha yang dilakukan pemerintah selain memberikan Perlinsos untuk menurunkan kemiskinan ekstrem. Sejauh mana usaha BPKP dalam mengurangi kemiskinan ekstrem tersebut di Tahun 2021 ? Mohon dijelaskan, Pak Kepala BPKP.

Dan selanjutnya berkaitan dengan Dana Desa, seperti yang kita ketahui selama ini, perhitungan dan penetapan dana desa dilakukan oleh Pemda dan ditetapkan secara resmi oleh Peraturan Kepala Daerah, Perkada. Proses penetapan ini bisa dibilang membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga mengakibatkan penyaluran dana desa menjadi terhambat. Selanjutnya dalam hal pengajuan dana desa, desa juga mempersyaratkan dokumen yang harus dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa di mana dokumen tersebut sebagian besar perlu memakai aplikasi untuk mempermudah pengisian data dan pelaporan dana desa. Prosedur pengajuan dana ini tentu menyulitkan bagi beberapa desa pak, apalagi jika desa tersebut belum terlalu mengenal teknologi, karena aparat desa tersebut harus paham terhadap aplikasi berbasis teknologi yang dipakai untuk pengajuan itu.

Dari dua hal tersebut, bisa dikatakan proses pengajuan dan penyaluran dana desa ini terkesan panjang dan rumit, mungkin bisa saja kedua hal ini bisa menjadi salah dua penyebab belum terealisasinya dana desa di beberapa desa sehingga mengakibatkan juga banyak permasalahan di desa. Pertanyaan saya pak, bagaimana langkah strategis yang bisa dibuat agar proses pengajuan tidak lama ? *gitu* pak. Kemudian bagaimana BPKP melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah terkait bagaimana menyusun anggaran berbasis kinerja *performance* agar, agar rancangan program kegiatan dan anggaran per fokus pada penyelesaian isu-isu strategis di masyarakat dan dirancang secara efisien di tengah penanganan Pandemi Covid-19 ?

Kemudian kerjasama KPK, Mendagri, dan BPKP itu perkuat upaya pengawasan di bidang korupsi seperti adanya *monitoring center*, *monitoring center for prevention* atau MCP. Dan berkaitan dengan pengawasan Tahun

2022, agenda prioritas, agenda prioritas pengawasannya itu dalam pengelolaan keuangan negara berkaitan dengan Sektor Kesehatan dan Perlindungan Sosial bagi masyarakat, bagaimana BPKP melakukan lebih dini atau deteksi dini untuk mengawal, mengawal *monitoring*-nya, karena dengan situasi sekarang ini fokus mengawal area strategis yang beresiko tinggi sangat penting apalagi di *slide* Halaman 15, kalau saya lihat itu terdapat reformasi pembangunan SDM di bidang kesehatan. Mohon dijelaskan pak. Dan di *slide* yang di Halaman 22 tentang agenda prioritas pengawasan daerah 2022, dari 68 topik pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, ada 9 pengembangan kawasan dan ekonomi serta 9 pariwisata. Tentunya penyertaan APBN ada juga dalam proses titik ini apalagi titik pengawasan 2022 merupakan salah satu prioritas BPKP, mohon dijelaskan pak.

Kemudian 3 arahan pak, 3 arahan Presiden Jokowi kepada BPKP adalah Rakornas pengawasan Intern Pemerintah 2021. Kemudian 3 itu adalah tingkatkan pengawasan, tingkatkan pengawalan percepatan belanja pemerintah, tingkatkan pengawasan kualitas perencanaan program sejak awal, tingkatkan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah. Masalah krusial yang kita laporkan ditemukan adalah pertama tentunya kualitas validitas data anggaran PCPN 2021.

Dalam laporan hasil pengawasan Tahun 2021 yang disampaikan Kepala BPKP itu, *powerpoint* Halaman 6 dinyatakan bahwa 28,25 juta paket bantuan UMKM dipastikan ketepatannya. Kemudian 214,29 juta itu paket Bansos dipastikan sampai kepada penerima yang berhak, tetapi berdasarkan berbagai laporan yang diterima Komisi XI DPR RI, juga informasi di berbagai media massa ternyata masih banyak sekali bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran. Banyak warga miskin masih belum menikmati bantuan dan dari pemerintah karena nama mereka tidak masuk dalam daftar penerima bantuan. Di sisi lain dana bantuan justru diterima oleh warga masyarakat yang berkecukupan. Pertanyaannya pak, mohon dijelaskan bagaimana BPKP dapat menyimpulkan bahwa berbagai program bantuan Perlinsos (perlindungan sosial) dalam kerangka PCPN tersebut dipastikan tepat sasaran dan diterima oleh warga masyarakat yang berhak ?

Kemudian belajar dari pengalaman Tahun 2020 dan Tahun 2021, pemerintah harus mengefektifkan penggunaan anggaran PCPN Tahun 2022 agar benar-benar efisien dan tepat sasaran termasuk anggaran untuk pengadaan Alkes dan klaim perawatan Pasien *Covid-19* dari rumah sakit. Perencanaan dan penggunaan anggarannya harus benar-benar diawasi agar efektif dan tidak membengkak di tengah jalan

Kemudian yang kedua, satu lagi pak. Itu kualitas perencanaan dan penganggaran daerah. Berdasarkan hasil evaluasi BPKP pada Tahun 2021 masih ditemukan berbagai masalah mendasar terkait kualitas perencanaan dan penganggaran daerah antara lain 80,81% itu program dirancang tidak tepat, tidak berorientasi hasil tidak terukur dan target tidak keakselarasi, yg tidak keakselarasi. Kemudian 83,22% kegiatan dirancang tidak tepat, kemudian berdasarkan anggaran yang dievaluasi dinyatakan bahwa 27,79%

itu berdampak dan tidak relevan belanjanya dan kemudian yang ke empat masih ada 19 provinsi yang LKPD nya belum meraih Opini WTP.

Komentar BPKP harus benar-benar memberi perhatian terhadap upaya peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah. Kalau ada masalah yang menghambat termasuk dalam melakukan koordinasi dengan Kemendagri harus dilaporkan presiden misalnya koordinasi dengan Kemendagri dalam memberikan persetujuan dan pengawasan APBD, sejauh mana berjalan selama ini, apa sudah efektif ?

Itu saja barangkali, Pak Kepala BPKB Pak Yusuf Ateh. Kemudian Pak Pimpinan Rapat, Pak Fathan, terima kasih. Lebih kurang, mohon maaf.

*Wabillahi taufik walhidayah.  
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

*Wa'alaikum salam Warahmatullah Wabarakatuh.*

Pak Satori, terima kasih. Luar biasa, selalu mengutip pidato presiden dalam pidato-pidatonya, ini kan.

**ANGGOTA KOMISI XI DPR RI :**

Kelihatan benar pendukungnya ya Gus, ya ?

**KETUA RAPAT :**

Pendukung kelihatan ini.

Semua Rakernas pasti ingat, semua Rakernas pasti ingat pidato presiden.

**ANGGOTA KOMISI XI DPR RI :**

Betul-betul.

**KETUA RAPAT :**

Luar biasa sekali ini.

**F-PDIP (Dr. H. MUSTHOFA, SE., MM.) :**

Kalau urusan desa Pak Satori jagoanlah itu.

**KETUA RAPAT :**

Pak Mustofa muncul juga akhirnya.

**F-PDIP (Dr. H. MUSTHOFA, SE., MM.) :**

Iya soalnya Pak Bupati pengalaman.

**KETUA RAPAT :**

Baik, selanjutnya PKB. Ibu Ella, silakan.

**F-PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.) :**

Iya, baik Pimpinan. Terima kasih atas waktunya.

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang saya hormati Pimpinan, Pak Fathan yang hari ini memimpin, Dan juga yang hadir Anggota Komisi XI yang hari ini hadir baik secara virtual dan juga Pak Ketua BPKP, Pak Yusuf Ateh beserta jajaran.

**KETUA RAPAT :**

Pak kepala.

**F-PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.) :**

Pak Kepala BPKP, Pak Yusuf Ateh beserta jajaran.

Terima kasih atas paparannya. Kami apresiasi menarik sekali apa yang dimunculkan dari mulai evaluasi, terus juga agenda prioritas 2022.

Ada beberapa catatan yang kami perlu sampaikan mewakili Fraksi PKB. Pertama, di Raker kemarin Bu Menteri menyatakan bahwa dana desa terkait dengan bantuan BLT tidak terserap, saya tidak tahu apa tidak terserap atau tidak disalurkan karena hanya mencapai 70 sampai 80%, jadi tidak total dari anggaran yang dialokasikan. *Nah*, ini menandakan karena kami tidak..., tahun kemarin tidak ikut sosialisasi BPKP, jadi tidak menjangkau ke desa tetapi banyak aduan karena mereka anggarannya tidak mencukupi dengan operasional dan bantuan untuk infrastruktur lainnya dengan standar penggunaan yang dilakukan oleh dana desa. Sementara dari pusat mengharuskan, *nah* atau menghimbau dana desa juga digunakan untuk BLT. *Nah*, padahal desa inikan juga rentang kendali yang paling bisa melihat kondisi masyarakat secara ril mana yang membutuhkan, mana yang tidak.

*Nah*, ini penting mungkin rekomendasi BPKP untuk bisa memberikan pandangan terhadap pemerintah, apakah ini dukungan anggaran ini cukup atau tidak sesuai dengan arahan dan himbauan untuk Pemerintahan Pusat ? Kira-kira kalau kurang ya jangan dikurangi untuk anggaran 2022. Dana desanya di-*pull-in* sesuai dengan standar yang mereka terima meskipun misalkan refocusing tapi *kan refocusing*-nya juga jelas untuk pemulihan ekonomi masyarakat. *Nah*, ini kami harapkan BPKP bisa bersuara untuk bisa mendorong kalau memang masih ada dana desa dianggarkan untuk

pemulihan ekonomi, BPKP setelah melakukan pengawasan di lapangan bersuara untuk bisa menambah anggaran dana desa minimal jangan dikurangi, itu yang pertama.

Yang kedua kami melihat dari *slide* terkait dengan prioritas pengawasan di Tahun 2022, mungkin tadi infrastruktur dan lainnya sudah kawan-kawan sampaikan, kami melihat ada *Slide 20*, luar biasa BPKP melakukan pengawasan terhadap ketahanan pangan. *Nah*, ini mulai dari pembagian pupuk, bibit, alsintan sampai ruang produksi untuk ketahanan pangan. Ini sangat jelas dilakukan untuk 2022 hanya kami ingin tahu sasarannya seperti apa ? karena lagi-lagi terkait subsidi pupuk harus tepat sasaran, benih juga harus tepat sasaran karena di lapangan masih bisa ditemukan subsidi pupuk. Kita sebenarnya harus *menskenariokan* bahwa penerima subsidi itu misalkan dengan lahan 2 hektar ke bawah, petani yang punya lahan 2 hektar ke bawah tetapi ini masih sangat umum. *Nah*, itu juga harus, harus, harus, harus, diperhatikan terkait dengan pengawasan dari BPKP. *Nah*, ini yang menarik ini adalah *food estate*, bahkan di 2021 juga ini masuk dalam evaluasi atau pengawasan BPKP. Anggaran yang cukup besar dari *food estate* 2021, ini masih ada di Halaman 4 ya ? di Halaman 4 coba dilihat, di *food estate* ada 2,54 triliun dengan jumlah kawasan bahkan ditunjang pupuk bersubsidi khusus cadangan beras pemerintah dan lain sebagainya. Saya ingin mendengar Opini BPKP untuk *food estate* seperti apa, karena pemerintah masih melakukan prioritas pembangunan untuk ketahanan pangan salah satunya, salah satunya adalah *food estate*.

Terus terang Komisi XI memang tidak bisa menerima desain *food estate* secara lengkap, tetapi dengan 77.650 hektar ini luas dan banyak. *Nah*, ini opini BPKP untuk evaluasi 2021 seperti apa, apakah cukup layak dilanjutkan atau memang ada evaluasi ? karena memang desain pengawasan 2022 juga masih difokuskan untuk apa, ketahanan pangan salah satunya *food estate*. *Nah*, ini harus tajam. Kami mendukung Opini BPKP dalam rangka membuka transparansi itu.

Saya belum melihat terkait Opini BPKP di anggaran digitalisasi. *Nah*, ini penting karena termasuk ya Kementerian Keuangan juga kita selalu melihat besar sekali anggaran digitalisasi karena ini adalah eranya digital mau menginjak 4.0. Ini penting transparansi anggaran digital untuk dilakukan disemua lembaga baik itu Pemerintahan Pusat ataupun Pemerintahan Daerah. Anggaran digitalisasi 2021 bahkan 2022 itu cukup sangat tinggi, mungkin kami akan terbatas ketika melihat dan mengerti terkait *spek* dan standar yang dilakukan apa yang memang menjadi target, apakah itu untuk digitalisasi kebutuhan internal atau untuk juga *include* pelayanan terhadap masyarakat di era percepatan yang cukup maju hari ini. *Nah*, ini juga penting BPKP melakukan kajian opini yang cukup transparan terkait dengan anggaran digitalisasi yang semua KL dan juga bahkan pemda melakukannya

Yang terakhir, kami melihat anggaran cukup besar yang dilakukan pengawasan BPKP terhadap BUMN, BUMD dan BULD apalagi terhadap pengawasan korporasi, terlebih ini adalah mitra Komisi XI yang mendapatkan PMN, kami dibantu juga opini BPKP karena kita sama-sama melakukan

pengawasan dan pertanggungjawaban bersama. Sejauh mana skema yang dilakukan oleh BPKP dalam rangka pengawasan BUMN atau skema korporasi dana pemerintah yang ditempatkan di BUMN ? nah, ini juga penting untuk mendapat kami, kami mendapat opini dari BPKP, jadi karena memang BPKP mitra Komisi XI, harapan kami kita cukup terbuka skema yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka evaluasi 2021 termasuk juga pengawasan 2022 biar kerja kita sinergis dan juga transparansi, akuntabilitas juga muncul di dalam pengawasan yang kita lakukan bersama.

Mungkin itu Pimpinan yang bisa kami sampaikan, terima kasih. Kurang lehinya, mohon maaf.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq.*

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT :**

*Wa 'alaikum salam Warahmatullah Wabarakatuh.*

Terima kasih Ibu Ella karena Lampung ini lumbung pangan jadi ada pisang cavendish banyak sekali di sana itu ya ? jadi, subsidi pupuk ini sangat penting saya kira ini ketahanan pangan.

Baik, Fraksi Demokrat, silakan. Mbak Vera ? Pak Didi ?

Silakan, Ibu Harmusa.

**F-PD (HARMUSA OKTAVIANI) :**

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang saya hormati,  
Pak Yusuf, Kepala BPKP beserta jajaran,

Terima kasih paparan yang telah disampaikan.

Pertama-tama yang ingin saya sampaikan, terkait tahun lalu pada Tahun 2021 yang lalu BPKP pernah menyatakan bahwa pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah masih sangat kurang, hal ini sangat tercermin dari temuan BPKP di mana sekitar 30% sampai 40% anggaran belanja daerah tidak menghasilkan manfaat apapun. Ini juga kami sempat menyampaikan hal ini juga terkait pemanfaatan daerah yang masih minimal kepada Kemenkeu, pada rapat yang lalu karena dari pusat sangat berharap daerah bisa memanfaatkan anggaran yang ada apalagi ditengah Pandemi Covid saat ini, namun pada kenyataannya daerah masih belum maksimal dalam pemanfaatan anggaran yang ada. Tadi juga sempat dipaparkan oleh BPKP yang menyatakan bahwa 27,79% nilai penganggaran daerah sangat tidak efektif dan sangat tidak efisien, ini juga menjadi concern kami, mengingat *tagline*, *tagline* Kemenkeu yang berbunyi "*spending better*" namun tidak linear dengan penganggaran di daerah, nah ini apa yang bisa



BPK siapkan terkait langkah strategis yang sangat efektif untuk dapat menangani hal seperti ini sekaligus agar mencegah kembali adanya nilai pelanggaran yang tidak efektif di daerah selain melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah terkait bagaimana menyusun anggaran ? tentunya BPKP juga bisa membina atau melakukan pembinaan kepada pemerintah, bagaimana cara memaksimalkan dana daerah yang ada apalagi masyarakat kita di daerah benar-benar saat ini sangat membutuhkan uluran tangan dari kita, apalagi pemerintah daerah yang sangat berhubungan langsung dengan masyarakat dibawah.

Kemudian yang kedua, bagaimana tata kelola implementasi anggaran kementerian atau lembaga dan Pemda pada Tahun 2021 ? kasus yang suka ditemukan adalah soal pemantauan anggaran setelah digunakan, *nah* ini menjadi *concern* kami karena sering kali kementerian atau lembaga hanya memikirkan atau memperhatikan sampai bagaimana anggaran itu habis digunakan atau programnya selesai, misalnya membangun puskesmas. Ini contoh kecil saja, begitu puskesmas itu berdiri maka pemantauan anggaran itu selesai padahal fungsi APBN bukan cuma sampai di sini, bukan hanya melihat bangunan atau anggaran itu habis tapi juga manfaat setelah bangunan itu ada mungkin ini yang harus BPKP maksimalkan terkait penggunaan anggaran dan pemanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat kita.

Tadi juga dipaparkan oleh BPK bahwa diketahui kelemahan penganggaran tata kelola Dana Desa yang terletak pada SDM, tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Pak Satori karena istrinya juga sebagai pemangku kebijakan daerah, *nah* ini bagaimana ?

**KETUA RAPAT :**

Kok tahu, Mbak Harmusa ?

**F-PD (HARMUSA OKTAVIANI) :**

Tadikan disampaikan Gus, tadi Pak Satori sudah panjang lebar menyampaikan terkait itu. *Nah*, ini apa yang BPKP dapat disampaikan kepada kami terkait hal tersebut yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar kualitas SDM di desa ini dapat ditingkatkan ? karena apa, sekarang anggaran dari Kemendes itu langsung ke desa dan Pemerintah Daerah tidak berhak atas anggaran tersebut. Jadi, kalau SDM di tingkat desa tidak bisa bina untuk bisa menggunakan anggaran tersebut dengan maksimal, maka nantinya anggaran ini akan percuma pemanfaatannya akan benar-benar kurang maksimal. *Nah* ini mungkin yang harus BPKP juga pikirkan atau menjadi *concern* di tahun ini agar penggunaan dana desa benar-benar maksimal dan tepat sasaran.

Juga tadi kami menyoroti mengenai hasil pengawasan BPKP pada Tahun 2021 seperti 214,29 juta paket bansos dipastikan sampai kepada penerima yang berhak, lalu 28,25 juta paket bantuan UMKM juga dipastikan akan tepat sasaran. *Nah*, pernyataan seperti ini mungkin agak tanggung ya,

karena berapa perbandingan jumlahnya dengan bantuan yang belum tepat sasaran. Mungkin ini harus diperhatikan benar-benar karena sepengetahuan saya pun apalagi didapil saya masih banyak bansos yang belum sampai ke masyarakat yang benar-benar tepat sasaran. *Nah*, mungkin ini adalah salah satu dari penyebab data dari kementerian atau lembaga yang masih belum *ter-connect*, jadi data yang dipakai dari Kemensos, mungkin dari Kemenkeu, atau mungkin dari kementerian yang lain ini belum sama, makanya banyak bantuan sosial yang belum tepat sasaran atau mungkin tumpang tindih, dari Kementerian Sosial dapat (***rekaman kurang jelas/suara kurang jelas***), dari Pemerintah Daerah dapat. *Nah*, mungkin ini yang bisa kita selaraskan.

Jadi misal pun data ini bisa jadi satu nantinya, masyarakat kita yang menerima juga akan lebih merata, tidak ada *double* penerimaan. Jadi, bisa dikoordinasikan. Kemarin Kemenkeu juga menyampaikan satu data yang akan dibikin agar kementerian lembaga tertentu bisa memiliki data yang sama. Ini mungkin kalau memang bisa terealisasi sangat, sangat membantu kepada pemerintah, pusat sampai kedaerah dalam pemberian bantuan-bantuan apapun dari sembako, bantuan UMKM dan bantuan apapun untuk masyarakat.

Yang terakhir mungkin terkait tenaga kesehatan, tadi tercatat pada Tahun 2021, *insentif* kepada 248.000 sekian tenaga kesehatan itu dipastikan ketepatannya, *nah* ini 2022 kami membaca bahwa ada beberapa daerah ditahun ini yang tidak menganggarkan *insentif* kepada Nakes. *Nah*, ini bagaimana pengawasan BPKP terkait hal itu ?

Yang terakhir pimpinan, pada agenda prioritas 2022 pengentasan kemiskinan ekstrim adalah salah satu agenda yang sangat besar jika kita maksimalkan dan kita terapkan di tahun ini, ini menurut BPKP dengan hasil pengawasan yang cenderung menemukan fakta bahwa tata kelola penganggaran negara belum baik, ini bagaimana optimalisasi BPKP dalam lihat agenda ini agar pada Tahun ini 2022 kita bisa mengentaskan kemiskinan ekstrim agar masyarakat kita bisa lebih baik lagi dalam kehidupan sehari-hari terutama ini gelombang kedua *Covid* (***rekaman kurang jelas/suara kurang jelas***) mulai virtual. *Nah*, ini bagaimana pandangan BPKP dalam melihat kondisi seperti ini ?

Mungkin itu saja Gus Fathan, terima kasih atas waktunya. Sejak hari, hari ini bagaimana kalau seperti ini, itu saja.

**KEPALA BPKP (M. YUSUF ATEH) :**

Terima kasih Ibu.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, Bu Harmusa Oktaviani Dapil Jawa Tengah 3, Pati, Rembang dan Blora, Pak Yusuf Ateh.

Selanjutnya Fraksi PKS, silakan Ibu Anis, Pak Ecky.

**F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.) :**

...(rekaman kurang jelas/suara kurang jelas) Pak Ecky, Pak Jun ?  
Kalau *nggak* ada, boleh saya.

**SEMUA ANGGOTA DARI FRAKSI PKS :**

Silakan, Bu Anis.

**F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM) :**

Saya baru selesai divaksin Bu Anis.

**F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.):**

*Allahu akbar*, mudah-mudahan segera sehat ya, Pak Ecky ya.

**KETUA RAPAT :**

Sudah ke berapa ? Kelima, Pak Ecky

**F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.) :**

Vaksin *kok* kelima ?

**F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM) :**

Ketiga pak, sesuai dengan jumlah cabang, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT :**

Siap.

**F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM) :**

Kalau tiga itu sesuai angka yang ini yang cocok memang itu Bapak.....01;42;00. (rekaman kurang jelas/suara kurang jelas)

**KETUA RAPAT :**

Iya, iya.

Pak Ecky kan ke Amerika Johnson & Jhonson juga dia.

**F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.) :**

Oke *iya* Pak Ketua.

**KETUA RAPAT :**

Silakan, silakan.

**F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.) :**

Iya.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

*Wa 'alaikum salam.*

**F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.) :**

Terima kasih Pimpinan Komisi XI, rekan Komisi XI, kemudian Kepala BPKP Pak Yusuf Ateh beserta jajaran, mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Yusuf ya.

**KEPALA BPKP (M. YUSUF ATEH) :**

Amin, amin.

**F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.) :**

Ini paparannya luar biasa, *slide-slide*-nya juga luar biasa, *gitu ya*. Jadi, ada...

**KETUA RAPAT :**

Lengkap ya ? lengkap ya ?

**F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.) :**

Jadi, apa, *seneng gitu ya* dengan kinerja BPKP ini tapi ada sedihnya juga, sedihnya *ngelihat* anggarannya *kok dikit banget gitu ya* dengan kualitas pengawasan seperti ini *ya*. Kalau lihat di paparannya itu saya itukan BPKP sepanjang Tahun 2021 pengawasannya 87 kementerian dan lembaga, kemudian 108 BUMN, 1.123 BUMD, 765 BLUD kemudian 542 Pemda dan temuan-temuannya juga saya pikir bagus *ya* sebagai koreksi evaluasi masukan untuk pemerintah dan juga untuk kita semua sebagai lembaga yang bertugas mengawasi bagaimana pemerintah menjalankan amanatnya.

Pak Yusuf ini banyak *ya* disoroti di *slide*-nya Pak Yusuf ini tentang bagaimana tidak efektifnya Pemda *ya*, kalau saya lihat di *slide* itu, BPKP melakukan evaluasi atas 18 Pemda di *slide*-nya Pak Yusuf *ya* ? ini yang digambar *chart* nya itu 27,79% tidak efektif dan tidak efisien berpotensi tidak

berdampak dan tidak relevan belanjanya kemudian 1,86% efektif namun tidak efisien. Iya, nilai devaluasi itu 15, 29 triliun. Yang menarik ini ada *note* dari BPKP hasil evaluasinya. Pemda itu 18 T ini 80,81% program dirancang tidak tepat, tidak berorientasi hasil, tidak terukur, target tidak selaras, *gitu*. Inikan artinya 80% *gitu loh*. Jadi yang tepat, yang selaras dan terukur hanya 20% dari program dan kegiatan 18 Pemda ini, ini tentu menjadi catatan *ya* buat kementerian terkait *ya*, Kemendagri, kemudian Kementerian Keuangan, dan juga kita tentu saja yang punya tugas pengawasan, *ya*. Dan ini saya pikir hal-hal seperti ini perlu diangkat *ya*, dan ini menjadi catatan penting bagaimana pemerintah bisa melakukan perbaikan terhadap kondisi-kondisi seperti ini.

*Nah*, kemudian kalau untuk pemerintahan kelihatannya agak bagus *nih* penilaian BPKP, kalau Pemda itu tadi kayak *gitu ya*, tapi kalau untuk pemerintah, pemerintah pusat, ini kelihatannya bagus-bagus ini penerimaan dari BPKP *ya*, 200 UPSN terkawal akuntabilitasnya, 62 akses strategis korporasi negara terkawal akuntabilitasnya, diantaranya restrukturisasi bisnis PT Garuda Indonesia, penjualan 13 aset tetap PT Asuransi Jiwasraya, pemanfaatan aset TMII, itu saja saham PT KAI kepada PT Mutiara, itu menurut BPKP perkara akuntabilitasnya, *ya*. Mungkin ini perlu kita lihat lagi *ya* karena sumber-sumber yang juga menyebutkan tidak seperti ini bagus *gitu ya*, misalnya tentang Jiwasraya, penggunaan aset TMII. Saya, TMII itu ada di Dapil saya Pak Yusuf dan saya pernah mengadakan pameran UMKM di situ bertemu dengan direktornya yang baru diangkat *ya* dan saya bicara cukup banyak tentang pemanfaatan aset TMII yang ini perlu *ya*, perlu digali lagi *ya*, karena saya melihat banyak sekali hal-hal yang sangat harus diperbaiki untuk TMII.

Kemudian juga insentif kepada 248.647 tenaga kesehatan dipastikan ketepatannya. *Nah*, ini juga mungkin harus didalami lagi karena begitu banyak tenaga kesehatan yang mengeluhkan belum mendapatkan nakesnya, *ya* para dokter. Kemudian juga disebutkan di sini penetapan harga test PCR dengan antigen dipastikan akuntabel, terjangkau oleh masyarakat. *Nah*, itu sekarang-sekarang inikan *ya*, padahal kan pengawasan BPKP kan sepanjang Tahun 2021. *Nah* bagaimana di awal-awal penetapan test PCR itu kan luar biasa, *ya* Pak Yusuf, *ya*. Kalau di akhir-akhir dan penetapan-penetapan apa harga ini itu *udah* sangat, *udah* sangat terlambat *ya* menurut saya. Jadi, di awal-awal itu kan luar biasa, sangat tidak terjangkau test PCR ini, baru-baru ini *ajakan* baru di turunkan. *Nah*, bagaimana Pak Yusuf melihat hal ini ?

Kemudian ada satu hal lagi, tadi sudah disinggung oleh teman *ya*, kalau *nggak* salah Pak Misbakun *ya*, itu menyebut tentang cadangan PEN. *Nah*, ini cadangan PEN Menkeu yang mengatakan bahwa dana cadangan PEN dan SAL Tahun Anggaran 2021 itu totalnya mencapai 53,1 triliun itu digunakan untuk menambah modal anggaran BUMN dan lembaga. Dari cadangan PEN Menkeu menggunakan dana sebesar 33 triliun dan pemanfaatan SAL sebesar 20,1 triliun, di antara penerimanya itu PT Hutama Karya sebesar 25,2 triliun dan Waskita Karya sebesar 7,9 triliun. *Ya* ini kita mau tahu *ya*, bagaimana sebagai lembaga pengawas ini BPKP melihat kondisi ini dari sisi pengawasan.

*Nah*, kemudian saya kira BPKP ini harus punya komitmen kuat *ya*, yang selama ini sudah diperlihatkan itu terus *istiqamah ya*, Pak Yusuf *ya*, untuk mendorong penerapan manajemen risiko termasuk risiko *fraud* atau korupsi *ya*. Tadi *slide*-nya juga ada *kan* Pak Yusuf ? kemudian komitmen juga *istiqamah* meningkatkan pengawasan pada area-area dengan resiko tinggi *ya* dan kemudian mendorong perbaikan pengendalian internal secara berkelanjutan.

*Nah*, kemudian agenda prioritas pengawasan BPKP Tahun 2022 ini masih akan fokus terhadap pengendalian *Covid-19* dengan memprioritaskan sektor kesehatan kemudian menjaga keberlangsungan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu *ya*, walaupun disini Tahun 2021 angkanya bagus semua UMKM sudah tepat sasaran dan sebagainya. Tapi seperti teman-teman lain juga menyebutkan, kita semua tersebar di dapil dan kita juga membina UMKM, Pak Yusuf, dan paling tidak *ya* UMKM yang dipimpin oleh kita itu, jangan sampai dapat bantuan, *denger* juga *nggak* adanya bantuan dari pemerintah. Saya itu membina di Jakarta Timur lebih dari 1.000 UMKM, bekerjasama dengan aparat kelurahan, kecamatan, *gitu ya*, dan UMKM yang kita bina itu mikro *ya*. Benar-benar mikro, ibu rumah tangga yang betul-betul itu, itu boro-boro dapat bantuan, *denger* ada bantu mereka, mereka tidak dengar *ya*. Jadi, mungkin hal ini juga, begitu juga dengan Perlinsos.

Perlinsos itu kalau dikatakan tepat sasaran *ya* *nggak* juga, *gitu ya*, karena masih banyak *ya* dan sangat banyak *ya*, setidaknya di dapil kita itu yang mereka seharusnya dapat, itu *nggak* dapat. Ini masalah data *ya* ? jadi, Pak RT merasa sudah memberikan data, Pak RW memberikan data tapi kemudian data itu *nggak* dipakai, *gitu*. Ada yang meninggal, malah dapat *gitu*. Yang sudah meninggal tapi malah dapat. Jadi, saya kira ini perlu ditingkatkan pengawasan lebih dalam karena ini langsung menyentuh masyarakat, kita *ya* termasuk, iya ini *ya*.

*Nah*, kemudian satu hal *ya* Pak Yusuf, pengawasan merupakan salah satu instrumen kunci untuk meminimalisir terjadi *fraud*. *Nah*, ini BPKP memiliki sistem pengelolaan keuangan untuk desa yang telah berbasis Web Siskeudes dan juga menerapkan Siswakeudes. Siswakeudes dapat dengan baik ketika Siswakeudes ini berjalan secara *online*. *Nah*, bagaimana BPKP ini memastikan kesiapan sistem ini terutama di daerah-daerah di luar pulau Jawa yang masih terkendala sarana dan prasarana *online* itu *ya*, termasuk mitigasi risiko yang sudah disiapkan. *Ya* karena kita tahu di daerah-daerah yang belum siap infrastruktur untuk melakukan secara *online* itu masih sangat banyak *ya*. Jadi, BPKP bagaimana mengatur aplikasi termasuk menginstruksikan.

Demikian, terima kasih Pimpinan atas waktu yang berikan

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

*Wa 'alaikum salam Warahmatullah Wabarakatuh.*

Terima kasih Bu Anis, ini sama Pak Eriko *nih*, Pak Ateh dapil Jakarta *nih*, Pak Ateh jadi *nggak* punya desa. Sosialisasi desa jadi *nggak-nggak* dilakukan.

Baik, selanjutnya Fraksi PAN, silakan. Pak Najib, Pak Yohan ? tidak ada ?

PPP ? tidak ada ?

**F-PDIP (H. MUSTHOFA) :**

Izin Ketua.

**KETUA RAPAT :**

Siapa yang mau ngomong lagi ?

**F-PDIP (H. MUSTHOFA) :**

Saya ketua.

**F-PPP (Dra. Hj. WARTIAH, M.Pd) :**

Ada PPP, ada PPP ada.

**KETUA RAPAT :**

Ada PPP ?

**F-PPP (Dra. Hj. WARTIAH, M.Pd) :**

Gus, PPP Gus,

**KETUA RAPAT :**

Saya kasih PPP dulu Pak Mustofa, kita.

**F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.) :**

Gus Mus sabar dulu Gus Mus, ada Bu Wartiah.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Silakan Bu Wartiah.

**F-PPP (Dra. Hj. WARTIAH, M.Pd) :**

Saya sedikit saja.

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang kami hormati Pimpinan Komisi XI beserta Rekan-rekan Komisi XI,  
Bapak Kepala BPKP Bapak Yusuf Ateh beserta jajarannya,

Saya kira sudah banyak yang disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu tetapi tentu saya mengapresiasi atas kinerja BPKP RI Tahun 2021 di mana dengan anggaran 1,4 triliun bisa menghasilkan kontribusi keuangan negara sebesar 54,32 triliun. Kemudian ada 44,4 triliun penghematan pengeluaran negara, 6,43 triliun penyelamatan keuangan negara dan 3,85 triliun ada di ... (**rekaman kurang jelas/suara kurang jelas**), namun demikian ada 2.525 permasalahan dalam tata kelola dana desa di Halaman 10, ini saya kira sering terjadi ketika kami di daerah juga salah satunya itu disebutkan karena mereka tidak mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran dengan baik. Sering itu menjadi apa namanya permasalahan di desa. Juga kami berharap ke depan bagaimana pendampingan terhadap pengelolaan dana desa ini terus ditingkatkan terutama sosialisasi bagaimana mengelola dana dengan baik dan benar.

Kemudian kami juga ingin menyampaikan tentang adanya pengawalan atas dana desa, BPKP melakukan evaluasi dana desa pada 234 kabupaten dan kota ada 11.681 desa dan sekitar 3.409 rekomendasi. *Nah*, adanya rekomendasi yang 3.409 ini, salah satunya yang banyak disebabkan oleh kurangnya memakai peraturan, memakai peraturan dengan baik dan benar. *Nah*, ini kami berharap ke depan atas temuan-temuan atau rekomendasi seperti ini tentu harus terus diminimalisir dan bagaimana strategi BPKP untuk itu pada 2022, nanti mohon penjelasan.

Kemudian dijelaskan untuk agenda prioritas pengawasan BPKP 2022, saya ingin menyinggung yang berhubungan dengan reformasi pembangunan SDM, di situ ada pendidikan dan ada perlindungan sosial. Yang kami ingin soroti yang berhubungan dengan kesehatan tentang *stunting* pak, Bapak Kepala *ya*. Di daerah kami itu *stunting* juga cukup tinggi *ya*, ini juga perlu ada perhatian khusus karena kita mengharapkan ke depan ini menjadi salah satu yang sudah disebutkan prioritas.

Yang lain-lain saya kira, kami juga sepakat dengan rekan-rekan terdahulu bahwa penguatan fungsi pengawasan harus terus ditingkatkan sehingga walaupun nanti BPKP, saya kira semua akan sangat setuju, anggaran BPKP itu direspon secara positif oleh Anggota Komisi XI bahkan kalau bisa ditingkatkan karena akibatnya yang luar biasa.

Saya kira itu saja dari kami, Bapak Pimpinan, mengingat rekan-rekan kami sudah banyak menyampaikan apa yang sudah menjadi catatan kami juga. Kurang lehbihnya, mohon maaf.



*Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq,  
Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

*Wa 'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih, Ibu Wartiah.

Semua fraksi telah menyampaikan pendapatnya, NTB *stunting* banyak tapi formula juga lagi bagus. Mandalika jadi sesuatu yang paradoks *gitu ya, stunting* banyak tapi Mandalika juga lagi *digeber, gitu*.

Baik, masih ada Pak Mustofa, masih ada Mbak Putri, masih ada Pak Kamarusamad, masih ada Pak Eriko.

Silakan Pak Mustofa dulu.

**F-PDIP (H. MUSTHOFA) :**

Baik, terima kasih.

*Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

**ANGGOTA KOMISI XI DPR RI :**

*Wa 'alaikum salam Warahmatullah Wabarakatuh.*

**F-PDIP (H. MUSTHOFA) :**

Pimpinan yang sungguh sangat saya hormati,  
Bapak-Ibu sekalian Anggota Komisi XI,  
Utamanya Pak Ketua BPKP, Pak Yusuf Ateh terima kasih kita dapat berjumpa walaupun dengan cara virtual,  
Pak Sestama, Pak Kepala Deputi, Pak Tono, dan juga Direktur Desa, Pak Wasis.

Jadi intinya apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan semuanya yang terdahulu ini, semuanya tidak ada yang tidak mendukung bahwa fungsi BPKP ini tentu harus diseimbangkan antara tugas, kewajibannya dengan soal anggaran. Saya ikut mengamani Pak Yusuf Ateh.

Satu hal yang sangat amat penting menurut hemat kami bahwa ada beberapa hal tentang, pertama, ini tentang kembali lagi kalau di KL kementerian dan lembaga semua tadi sudah disampaikan beberapa kawan kami terdahulu, ini semuanya agak terkendali dan semuanya baik tapi kalau saya melihat dari beberapa hal yang berbicara tentang dana desa, ini memang menurut saya ini sungguh sangat memprihatinkan. Kenapa saya katakan memprihatinkan ? bahwa kalau kita bicara tentang dana desa, ini

adalah terkait dengan kebijakan para kepala daerah khususnya para kawankawan bupati ini.

Pertama, bahwa saat ini BPKP ini adalah menjadi tumpuan umat, tumpuan masyarakat, kebutuhan-kebutuhan pokok yang ada di masyarakat ini adalah bagaimana BPKP menyikapi untuk bisa mengedukasi, bisa untuk memberikan pemahaman yang cukup. Itu salah satu contoh misalkan. Pada saat ini bicara tentang tata kelola dana desa, tata kelola dana desa ini saya yakin tidak mungkin ada desa yang mampu untuk membangun desanya padahal para kepala desa itu punya janji politik, artinya ketika dia dipilih janji untuk membangun desanya dan lain sebagainya, maka ini perlu ada tata kelola yang terbaik yaitu kebijakan kepala daerah harus berani mengambil alih untuk Bankeu-nya. Artinya para bupati harus mengambil alih bahwa infrastruktur itu, jalan ini dibagi tiga mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten termasuk jalan desa. Saya yakin, *haqqul yaqin* Pak Yusuf, Pak Ateh, ini tidak mungkin desa ini akan bisa membangun kalau tidak diambil alih oleh para kepala daerah, ini satu.

Kedua, tentang tata kelola aset. Bagaimana bisa tahu tata kelola di desa ini, mereka ini yang dari latar belakang yang berbeda, mungkin hanya karena dia dipilih karena kebaikan mereka tetapi sistem tata kelola ini perlu diterbitkan *juklak* dan *juknisnya* saja sehingga dibuatkan semacam *form* yang dia tinggal mengisi karena terus terang, ini ketika kepala desa terpilih itu rata-rata bagi mereka yang dapat lahan untuk sebagai kompensasi itu rata-rata pasti sudah digadaikan *loh* pak, jadi begitu terpilih itu digadaikan artinya digadaikan kepada penggarapnya, artinya kepala desa itu sudah nol. Ini fakta-fakta di lapangan.

Yang berikutnya bahwa saat ini untuk bicara tadi ketahanan pangan, pupuk dan lain sebagainya, ini sangat amat penting. Saya juga sangat *appraisal* sekali ketika kita berkumpul dan juga *pas* ada acara *reses* maupun kunjungan daerah pemilihan ini, tolak ukur ini dari Kementan ini untuk khusus subsidi, ini yang turun dari pengajuan 100% itu hanya 70% dari RDKK. Ini saya mohon nanti dikonfirmasi pak, kebenarannya sehingga nanti ini ada beberapa yang memang apa yang perlu kita sampaikan kepada Pak Kepala BPKP supaya nanti ada koordinasi, dan tidak kalah pentingnya ini selain karena masalah karena pupuk ini ada beberapa *ya* jenisnya, ini rata-rata hanya maksimal 70% dari RDKK. Inikan akan menghambat bagaimana untuk pangan dari pada sebuah wilayah.

Berikutnya, tidak kalah pentingnya, ini tentang kebijakan para kepala daerah. Kebijakan kepala daerah yang menurut saya bagaimana penyerapan dana desa ini lambat, ini juga termasuk kebijakan. Saat ini untuk kebijakan ini di masing-masing kepala daerah apakah ini ada instruksi dari Kementerian Dalam Negeri atau dari Kemendes bahwa dana desa bisa dicairkan apabila, apabila 75% untuk apa ini usia lansia, ini harus sudah mendapat suntikan *Covid*, *ya*. *Nah*, saya pikir kalau di usia lansia ini, inikan sudah mengandung banyak penyakit, komorbid misalkan, penyakit penyertanya *kan* banyak. Merekakan tidak mungkin akan memaksa ketika orang sudah bawa penyakit, langsung divaksin dan lain sebagainya. Ini juga menjadi persoalan ketika

dana desa itu tidak cair karena memang tidak diperizinkan untuk dicairkan, ini juga salah satu hambatan.

Inilah yang masing-masing memang perlu ada koordinasi Pak Yusuf Ateh kepada kementerian yang lain sehingga nanti kalau saya lihat dana desa penyerapannya bagaimana, tata kelola daripada aset desa tata kelola daripada dana desa ini juga memang sangat penting.

Dan terakhir, tentu ini yang ingin saya tanyakan kewenangan kejaksaan dalam sosialisasi tentang dana desa pak. Ini perlu menjadi catatan dan kalau perlu langsung buat surat edaran bapak karena terus terang para Kajari itu membuat kegiatan sosialisasi tentang dana desa yang desa harus menganggarkan untuk 1.000.000 sampai 1.500.000. Inikan juga mereka cara pertanggungjawabkannya *gimana* itu nanti, sehingga hal-hal begini, padahal inikan kewenangan-kewenangan daripada BPKP yang mungkin nanti bisa didedikasikan kepada teman-teman kita semuanya dan juga memang perlu dibuatkan petunjuk pelaksanaan yang tepat, sehingga ini bukan mengadu tetapi persoalan mereka, ini adalah menjadi persoalan kita semua. Terus terang saya yakini bahwa tidak ada kabupaten yang baik dan maju kalau desanya tidak baik dan maju. Sebaliknya, tidak ada provinsi gubernur yang baik kalau kabupaten kotanya tidak baik sehingga sampai dengan di pusat. *Nah*, inilah karena bapak punya peran fungsi yang begitu besar dalam pengawasannya dan kalau saya dari awal tadi sungguh sangat luar biasa Pak Yusuf Ateh dan semuanya jajaran di BPKP, ini harapan saya satu, *yuk* kita sama-sama bangun mulai dari desa untuk kuasai Indonesia. Ini yang terpenting sehingga semuanya akan berasa dapat manfaatnya dan semua akan menjadi tumpuan ini di BPKP dan jangan ragu untuk mempertahankan dan juga untuk menaikkan anggaran di BPKP ini demi kemaslahatan umat bukan demi kebahagiaan daripada BPKP.

Ini yang terpenting, mudah-mudahan menjadi catatan khusus kepada bapak dan juga bisa segera untuk menerbitkan ini sehingga kegalau-galauan bisa ini betul-betul bisa teratasi dengan baik. Saya sudah mulai rindu pak dengan sosialisasi dengan kawan-kawan BPKP dan kami adalah orang yang sangat aktif dengan teman-teman BPKP yang ada di perwakilan, mudah-mudahan mulai dari Pak Wasis sampai dengan bapak yang sekarang ini, iya kita terus selalu berkomunikasi sehingga mudah-mudahan apa yang menjadi masukan ini menjadi fakta-fakta di lapangan, bisa ditindaklanjuti.

Terima kasih Pimpinan, mohon maaf Pak Yusuf Ateh, Pak Sestama, para deputi, dan juga Pak Direktur Desa yang harus kembali ke desa ini dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Sukses untuk BPKP, pastikan karena ini adalah demi kemaslahatan umat dan kesejahteraan Rakyat Indonesia.

Terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

*Wa 'alaikum salam Warahmatullah Wabarakatuh.*

Merdeka Pak Mustofa !

**F-PDIP (H. MUSTHOFA) :**

Merdeka !

**KETUA RAPAT :**

Baik, iya semakin *fresh* saja ini, kelihatannya muda *gitu*.

Ibu Puteri, silakan.

**F-PG (PUTERI ANETTA KOMARUDIN, B.Com.) :**

Siap Gus Fathan, terima kasih.

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang terhormat Pak Yusuf Ateh beserta seluruh jajaran, semoga sehat selalu pak, semoga kita ketemu nanti *udah* bisa fisik, *nggak* virtual lagi, karena *udah* lama *nih* kita *nggak* ketemu sama Pak Yusuf Ateh.

Sudah banyak tadi sebenarnya yang disampaikan oleh rekan-rekan, tapi saya ingin menguatkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Misbakun juga yang pertama apresiasi kita terkait dengan fungsi pengawasan dari BPKP terhadap pengeluaran di tingkat karena telah berhasil menyelamatkan keuangan negara mencapai 6,4 triliun dan kami sangat berharap capaian ini bisa terus dijaga karena keberadaan BPKP ini tentu sangatlah penting untuk kita semua memastikan tidak adanya kebocoran anggaran, jadi anggaran di pemerintah itu bisa semakin efisien dan optimal penggunaannya.

Yang kedua, kami ingin mendapatkan juga hasil audit BPKP terhadap isu-isu yang sangat ramai dan kemarin sempat menjadi perbincangan hangat di antara publik seperti misalnya dugaan kasus korupsi Garuda Indonesia dan juga pembengkakan biaya pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung. Kami ingin mengetahui berapa potensi kerugian negara yang terjadi pada kasus-kasus ini dan apa saja temuan yang dihasilkan dari audit ini ? kalau memang tidak bisa disampaikan secara langsung, kami sangat berharap BPKP dapat menyampaikan informasinya secara *konfidensial* kepada kami.

Dan yang berikutnya, terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah. Selanjutnya sebenarnya sangat menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Ateh mengenai evaluasi di mana Pak Yusuf Ateh menyebutkan ada 80% program yang dirancang tidak tepat, tidak berorientasi hasil dan tidak terukur dan tidak disertai dengan target yang sasaran, dan 83% kegiatan dirancang tidak tepat, tidak berorientasi hasil dan tidak terukur.

Namun di situ juga BPKP menyebutkan bahwa 70% anggaran yang dievaluasi telah dinyatakan efektif dan efisien karena berdampak dan relevan belanjanya. *Nah*, yang di sini saya *agak* kebingungan sama angkanya karena bagaimana mungkin ketika lebih dari 80 program dan kegiatan yang dirancang tidak tepat ini justru akhirnya disimpulkan telah efektif dan efisien. Mungkin nanti bisa dilengkapi oleh Pak Yusuf Ateh penjelasannya bagaimana akhirnya BPKP bisa melakukan penarikan kesimpulan ini dan kriteria efektif dan efisien apakah akhirnya yang ditetapkan oleh BPKP. Dan ini kan evaluasi hanya dilakukan pada 18 pemerintah daerah saja, jadi kami juga ingin mengetahui seperti apa kira-kira peta jalan dari BPKP sendiri dalam melakukan evaluasi kepada 500 pemerintah daerah lainnya, karena selain *sampling* tentu kita juga membutuhkan evaluasi yang menyeluruh agar bisa melihat efektivitas anggaran di pemerintah daerah lainnya.

Dan yang terakhir kami sangat berharap BPKP dapat mengawal beberapa agenda prioritas pemerintah seperti misalnya pembangunan Ibu Kota Negara baru senada dengan Pak Misbakun, ini harus apa menjadi salah satu hal yang bisa dipersiapkan dengan sangat baik tentu dengan pengawasan dari BPKP juga dan yang ingin kita lihat juga bagaimana BPKP bisa mengawal penanganan hak tagih negara dari dana BLBI dan tentu hal tersebut juga sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan juga mencegah penyimpangan yang nantinya bisa merugikan keuangan negara dan kami juga ingin melihat dan mohon untuk disampaikan oleh Pak Yusuf Ateh juga nanti strategi pengawasan seperti apa yang akan dilakukan BPKP kepada agenda-agenda prioritas pemerintah ini.

Demikian dari kami Pak Fathan, terima kasih atas waktunya

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

*Wa 'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Mbak Puteri Komarudin melengkapi pendalaman dan tentu respon dari BPKP.

Silakan yang lain, Pak Kamarusamad *nggak* ada, tadi ?

**F-P GERINDRA (Ir.H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.) :**

Terima kasih Pimpinan, Gus Fattan.

Kepala BPKP, Bapak Muhammad Yusuf Ateh beserta seluruh jajaran, sekretaris utama.

Pertama-tama tentu kita bersyukur karena hari ini masih bisa menjalankan tugas dalam keadaan sehat wal 'afiat.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI.

Tugas dan fungsi BPKP memang sudah diatur di dalam undang-undang dan ada 4 fungsi yang sangat penting dan vital untuk memastikan sasaran pembangunan nasional kita sesuai target, sesuai prosedur, sesuai waktu, dan sesuai *outcome* yang diharapkan.

Yang pertama, saya ingin menyampaikan pertanyaan mendasar pak sejauh mana Bapak BPKP ini khususnya berkaitan dengan BPKP perwakilan Jakarta melakukan fungsi pengawasan terhadap perencanaan pembangunan di Jakarta ? kenapa saya menanyakan hal ini, karena ada program yang misalnya tidak masuk dalam RPJMD, tidak masuk dalam RPJMD dan bahkan berpotensi merugikan keuangan negara seperti Program Formula E misalnya yang menelan biaya komitmen *fee* ratusan miliar dan program seperti ini sesungguhnya belum diperlukan oleh Masyarakat Jakarta secara umum. Kenapa saya katakan demikian Pak Yusuf, karena di Jakarta ini masih banyak sekali masyarakat yang belum bisa menikmati air bersih. Kita bisa tunjukkan lokasinya ke Pak Yusuf, masih banyak sekali masyarakat di Jakarta ini yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal tidak memiliki sanitasi, masih banyak sekali masyarakat kita di Jakarta ini yang memerlukan modal usaha UMKM yang harusnya di *back up* penjaminannya dan subsidi bunga melalui APBD atau APBN tapi di Jakarta banyak sekali masyarakat yang menggantungkan dirinya terhadap *Banke (bank keliling)* yang bunganya bisa mencapai 60% setiap tahun atau sama dengan 5 sampai 7% setiap bulan. Menunjukkan bahwa ada fungsi pengawasan dalam perencanaan yang belum sinkron terhadap arah pembangunan di Jakarta dalam melihat peran BPKP. Sebutlah misalnya kasus pembebasan lahan Munjol di Pondok Ronggon Jakarta Timur yang merugikan negara ratusan miliar, dimana letak fungsi BPKP di dalam mengawasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan tersebut karena itu kami mohon Pak Yusuf berkenan memberikan laporan hasil pemeriksaan, hasil pengawasan dari BPKP terhadap dua proyek, yang pertama Formula E di Jakarta dan yang kedua adalah Tanah Munjol, pengadaan tanah dengan rumah DP 0% di Pondok Ronggon Jakarta Timur karena ini merugikan betul-betul kondisi masyarakat Jakarta, itu.

Yang kedua, yang saya ingin sampaikan ke Pak Yusuf Ateh berkaitan dengan rencana kerja prioritas di Tahun 2022. Di sini bapak menyampaikan di dalam *paper*-nya terkait dengan kluster berdasarkan sektor dan tema serta topik. *Nah*, untuk sektor pembangunan SDM, kalau di dalam *nomenklatur* konstitusi kita sebetulnya disebut pendidikan Pak Yusuf. Yang dialokasikan 20% dari APBN setiap tahunnya, saya ingin mendapatkan satu penjelasan dari BPKP sejauh mana peran yang sudah dilaksanakan terhadap perencanaan, penggunaan dan pelaksanaan program dengan sumber anggaran pendidikan 20% dari APBN setiap tahun ? karena saya berikan lagi contoh, di Jakarta, ada banyak Kelurahan di Jakarta yang penduduknya terbesar, tidak memiliki SMP Negeri pak karena tidak ada upaya pemerintah membebaskan lahan, menyiapkan, sehingga mereka harus pergi ke daerah lain padahal penduduk suatu kelurahan itu 70.000, SMP Negeri saja tidak ada. *Nah, pingin* mendapatkan penjelasan dari bapak, 20% dana pendidikan itu apa *sih* yang bapak temukan di secara umum, di seluruh provinsi dan kabupaten secara khusus tentunya di Jakarta karena pendidikan ini adalah

kita sama tahu salah satu fundamental sumber kemiskinan struktural karena itu. Ini yang perlu kita *tongkrongin* Pak Yusuf untuk memastikan 542 triliun dana pendidikan setiap tahun yang dialokasikan melalui APBN betul-betul bisa mengangkat harkat dan derajat martabat bangsa kita.

Berikutnya yang ketiga, yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya, yang ingin saya teruskan minta penjelasan kepada BPKP adalah berkaitan dengan perlindungan sosial. Perlindungan sosial yang sekarang selama ini kita terus menemui di lapangan, tidak tuntasnya data, tidak sinkronnya data yang membuat ada *deviasi*, ada penyimpangan kira-kira sekitar 15 sampai 30% salah sasaran di bantuan sosial, apakah itu PKH, apakah itu BST, apakah itu BPUM (Bantuan Pelaku Usaha Mikro) saya sebut 3 jenis saja itu. *Nah*, apa *sih* yang bapak temukan lebih detail, bisa *nggak* kasih gambaran di Pemda mana supaya kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan data ini karena ini adalah kebocoran kalau dikumpul maka besar juga pak nilainya.

Kemudian berikutnya menyangkut penjaminan usaha UMKM, dimana APBN ditempatkan di Jamkrindo dan ditempatkan di Askrindo untuk menjamin usaha untuk UMKM dan pelaku usaha lainnya. Apa bapak tidak menemukan sesuatu di dalam penjaminan itu ? misalnya contohnya KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang bunganya 6% sampai ke masyarakat disubsidi oleh APBN 8%. jadi tinggal 6%. Tadinya 14% tinggal 6% dijamin oleh Jamkrindo dan Askrindo ditempatkan APBN triliun uang, tapi mohon maaf beberapa oknum perbankan kerjasama dengan internal perbankan sendiri. Bayangkan mengajukan klaim misalnya ke Jamkrindo dan Askrindo bahwa KUR-nya macet. Jadi negara rugi 2 kali pak, bunganya sudah disubsidi 6% kemudian sengaja dimacetkan kemudian diajukan klaim ke Jamkrindo untuk dibayarkan. Tolong *dong* pak buka, bank mana saja sebelum, kami punya 1, 2 datanya tapi dari bapak, boleh *nggak* bapak buka apa saja yang *bandel* seperti ini yang menggunakan fasilitas negara untuk rakyat tapi disalahgunakan untuk mereka.

Demikian Pimpinan, itu yang kami ingin sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih, Gus Fathan yang baik hati.

#### **KETUA RAPAT :**

Baik, Pak Kamarusamad.

Luar biasa Dapil Jakarta Utara, Jakarta Barat ini, yang tidak punya desa ini *ya* jadi tidak ada sosialisasi dana desa ini Pak Yusuf Ateh, ini kira-kira. Jadi isunya tentang beberapa isu Jakarta yang saya kira cukup *up date* tadi yang disampaikan Pak Kamarusamad.

Baik, ada pendalaman lagi dari yang lain teman-teman ? kalau tidak ada, terakhir Pak Eriko silakan.

#### **F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

Baik, terima kasih Pimpinan yang baik, Gus Fathan dan seluruh rekan-rekan Anggota Komisi XI yang saya banggakan untuk kesempatan bisa saya

dapatkan. Pak Yusuf Ateh.

**KEPALA BPKP (M. YUSUF ATEH) :**

Siap, Bapak.

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

Kepala BPKB, Pak Sestama begitu juga seluruh jajaran BPKP yang saya lihat lengkap di sini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, kita bersyukur hari ini bisa bertemu walaupun dengan *zoom*, tapi kita diberikan kesehatan, diberikan kegembiraan itu satu hal berkah, berkat yang luar biasa bagi kita semua.

Pak Yusuf Ateh, saya tidak ingin berpanjang lebar, karena teman-teman itu semua tadi rekan-rekan saya, saudara-saudara saya dari mulai tadi Mbak Indah, Pak Misbahkun, seluruh yang memberikan tanggapan sudah sangat lengkap menurut saya dan apa tidak ada lagi yang, yang terlewatkan tapi saya ingin satu hal yang konkrit Pak Yusuf Ateh, boleh saya langsung interaktif Pimpinan, Gus Fathan.

**KETUA RAPAT :**

Silakan, silakan

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.):**

Pak Yusuf Ateh kalau boleh saya bertanya, jangan tersinggung, sudah berapa lama bapak jadi Kepala BPKP ?

**KEPALA BPKP (M. YUSUF ATEH) :**

Saya 2 tahun Pak.

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.):**

Dua tahun ya pak, kira-kira berapa lama lagi Bapak Kepala BPKP kalau dari, dari komisi yang lainnya inikan boleh ini, kita bersaudara pak, sama seperti saya DPR kan sampai 2024, nanti bagaimana Tuhan izinkan juga ya.

**F-P GERINDRA (Ir.H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.) :**

Sestama ikut tersenyum kelihatannya ada sesuatu.

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

Jangan begitu Kamarusamad. Bung Kamarusamad ini Pak Yusuf Ateh dia ini pemenang, jadi memang luar biasa. Jadi Bapak mesti perhatikan betul



*nih* Adinda saya orang muda ini, dia di daerah yang cukup berat itu. *Nah* boleh dijawab Pak Yusuf Ateh kira-kira berapa lama lagi ? 3 tahun lagi.

**KEPALA BPKP (M. YUSUF ATEH) :**

Iya *insya Allah* sampai 2024 juga pak, sama bapak barangkali.

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

Betul-betul Pak Yusuf Ateh.

*Nah* Pak Yusuf Ateh, saya *nggak* mau berlanjut nanti kalau 2024. Bapak mau masuk partai *monggo* saja pak, kita membuka tapi itu nanti *lah ya* di luar ini nanti di *komplain* sama mbak.

**KETUA RAPAT :**

Itu penawaran ? PDI Perjuangan nawarin *tuh* ?

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

Saya *kan* hanya menyampaikan Gus Fathan, inikan tergantung Pak Yusuf Ateh. Kalau Pak Yusuf Ateh juga milih Gus Fathan saya juga tidak, tidak keberatan itu adalah soal pilihan *kan* begitu.

**F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.) :**

Iya biasanya Anak STAN masuk PKS.

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

*Nah*, Bro Misbakunkan itukan akhirnya *kan* terpancing. Dia kalau *nggak* begitu, *nggak* akan keluar dia dari sarangnya, *kan* begitu.

**F-PDIP (Dr. H. MUSTHOFA, SE., MM.) :**

*Nah*, dilihat elektabilitas Pak Yusuf ini sudah mulai meningkat.

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

Iya, Pak Mustofa, benar, benar.

*Nah*, begini Pak Yusuf Ateh kalau saya jadi bapak, saya akan meninggalkan satu *legacy* di, di BPKP yang tidak bisa orang lain tempuh.

**KEPALA BPKP (M. YUSUF ATEH) :**

Iya Pak.

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.):**

*Nah*, bagaimana caranya pak konkrit saya mengusulkan ke bapak, ini sebenarnya kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman ini semua, bapak harus menciptakan satu sistem pak, *no another choice* pak. Kalau bapak mau mengikuti situasi ini *nggak* akan selesai-selesai dan tidak akan tercapai yang namanya anggaran itu, kenapa ? saya konkrit saja pak, ini kan akan nanti sebentar lagi daerah otonomi baru muncul, di Jawa saja isunya 9 provinsi baru, belum kota kabupaten, belum diluar Jawa, *nah* bagaimana bapak bisa mengikuti itu semua ? pasti akan menambah personil, menambah kantor dan lain-lain, tidak akan tercapai pak sampai kapanpun itu. Kenapa tidak kita apa ya sederhanakan ? konkritnya begini pak, bank-bank sekarang melakukan digitalisasi yang walaupun tak jelas itu sebenarnya yang disebut digitalisasi, bagaimana bank modalnya *cekak* mau jadi bank digital di mana ada logikanya ? *Nah*, itu sama dengan sekarang ada istilah *flexing-flexing* itu, *nggak* ada logikanya itu pak. *Nah*, tapi BPKP punya kemampuan itu.

Presiden sudah menyampaikan ada yang namanya, siapa ? Ainun Najib dulu kawal Pemilu, saya masih *inget*, waktu itu mengawal data-data dari Singapura.

**KETUA RAPAT :**

Orang NU itu.

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

*Nah* itu, *nah* tapi ya kenapa Gus PKB harusnya lebih ini, di NU juga Gus tapi mungkin nanti ya tentu ada, ada saatnya nanti kita diskusi soal itu Gus.

*Nah* Pak Yusuf Ateh, bapak harus, harus memberikan langkah yang konkrit kalau kami menyebutnya *progresif revolusioner* kalau *nggak* percuma pak nanti bapak cerita lagi tahun depan, sekarang apa namanya, kesalahan penyaluran bukan 30%, 35%, *nah* ini bukankah itu sesuatu hal yang sebenarnya kita mengakui kekurangan kita sendiri pak. *Nah*, ini tidak ada cara lain pak, sistem yang harus dibenarkan dengan cara apa ? memang tidak ada pilihan lain pak, digitalisasi, apapun itu pasti bisa, *nggak* mungkin *nggak*. Dulu saya di bank pak, *nggak* mau saya ikut yang namanya email segala *macem* itu, karena kenapa ? nanti tiba-tiba kita rekening kita bisa dibobol atau apa. *Nah*, sekarang tidak ada pilihan lain pak, semua pakai sistem, memindahkan apa semua cukup dari sini.

*Nah*, kenapa BPKP tidak bisa seperti itu ? contoh di Bali, bagaimana soal pajak, detik per detik itu di Kabupaten Badung, kebetulan bupatinya dari PDI Perjuangan itu bisa diketahui walaupun situasi sekarang berat gara-gara tidak adanya turis. *Nah* apakah tidak bisa BPKP melakukan hal seperti itu pak ? itu pertama, itu bisa mencegah hal-hal yang tidak tersampaikan secara tepat, yang kedua kalau saya lebih, lebih *revolusioner* lagi pak, bahkan

mencegah diawal, kalau memang tidak memenuhi syarat *tet*, bunyi dia. *Nah*, Pak Yusuf Ateh tinggal bilang ini misalnya di, di Jakarta, *eh* coba Kepala BPKP Jakarta itu *cek* dulu tempatnya si anu itu, perusahaan negara yang ini itu, bunyi itu.

Saya *udah* lihat ada satu, ada satu kriteria yang pasti dia tidak penuhi, *nah* sehingga tidak perlu bertambah lagi Pegawai BPKP lebih banyak lagi pak untuk kedepan ini, karena kenapa ? sistem sudah terencana dengan baik dan nanti proses itu tentunya apa, katakan yang bekerja di BPKP juga akan menyesuaikan diri sehingga tidak diperlukan terlalu besar pak, terlalu banyak dan terlalu *crowded* karena Indonesia pengawasannya *udah nggak* ada lawan Indonesia pak, *double-double*, lapis berlapis, lapis berlapis, lapis berlapis tapi bobol pak. Nanti kita cerita tahun depan bukan 30% lagi, saya yakin pak lebih dari 30%, percaya saya itu pak, karena kenapa ? memang orang-orang kita kreatif. *Nah*, kenapa kreatifitas itu tidak diarahkan dengan membuat satu sistem yang semakin lama semakin baik seperti perbankan itu yang tadinya kita tidak percaya, sekarang akhirnya semua pakai ini pak dan itu juga memudahkan, tidak merepotkan, kan banyak juga yang menjadi isu-isu yang tidak baik, betul *nggak* pak, karena kenapa, ada daerah yang namanya daerah abu-abu, bukankah itu, kita jangan munafik, bukankah itu yang selalu terjadi daerah abu-abu yang tadi disebutkan Pak Misbakun itu juga. *Nah*, apa tidak bisa orang Indonesia pintar pak, dari Singapura bisa mengawal pemilu apalagi kita yang ada disini, *nggak* ada logikanya itu pak.

Sebenarnya tadi yang disampaikan oleh teman-teman, sekarang Pak Jokowi sudah melihat hal itu, *nah* kenapa kita tidak melakukan perubahan yang memang, yang memang *revolusioner* sekaligus ? ini *loh nggak* ada lagi cela, apapun ceritanya. *Oh* kalau ini bunyi dia, *nah* sekarang tinggal bertemu, ayo yakinkan apa yang terjadi itu karena tidak memenuhi secara standar dari katakan standar operasional prosedur dari program-program digitalisasi atau *whatever*, apapun namanya. Saya yakin bisa pak dan kalau itu bapak mintakan kepada kita juga dan kepada pemerintah. Saya yakin kita semua di sini sepakat katakan itu bertahap untuk 3 sampai 5 tahun kedepan, kenapa tidak bisa dan bapak meninggalkan *legacy* pak. Siapa yang melakukan perubahan luar biasa ini, Pak Yusuf Ateh. *Nah*, itu *nggak* bisa digantikan pak, seumur hidup bapak diingat, anak cucu kita pun mengingat itu zaman kakek buyut itu *loh*, itu yang melakukan perubahan luar biasa berani melakukan satu hal yang memang tidak populer jujur saja pak, saya harus *fair* di sini, tidak mudah itu.

*Nah*, Bapak tidak perlu menjawab ini secara apa ya, secara, apa namanya *verbal* nanti bapak buat tertulis kalau bapak perlu juga melalui Meja Pimpinan disini Gus Fathan yang baik, seandainya perlu kita lakukan secara tertutup nanti diskusi atau apa, *monggo* saja. Tentu kita sangat mendukung, tetapi adalah perubahan yang luar biasa pak, sebenarnya perubahan ini perubahan sederhana saja pak. Semua orang juga tahu bahwa ini yang perlu diperbaiki adalah sistemnya yang baik dan benar, tidak ada lagi cerita abu-abu, pasti bisa pak, tidak mungkin, tidak bisa, cuma apakah kita mau atau tidak ? *nah*, ini yang saya minta kepada Pak Yusuf Ateh, begitu juga Pak Sestama, seluruh jajaran BPKP.

Kemarin kita lakukan perubahan di dalam situasi yang tidak mudah ini pak, ini sebenarnya, ini sebenarnya satu apa ya ? memang situasi ini sangat tidak mudah dalam situasi Pandemi Covid tapi sebenarnya pasti yang maha kuasa punya satu keinginan yang baik untuk kita semua supaya apa ? supaya bisa berubah menjadi lebih baik. Tidak ada lagi yang namanya *cincai-cincai*, tidak ada lagi yang namanya *hengky pengky*, tidak ada lagi, *nah* ini, ini kesempatan pak dan ini juga membuat saudara-saudara kita di BPKP maupun di mana pun itu tidak berinteraksi secara langsung dan ini juga mengurangi efek dari apa penalaran-penalaran seperti sekarang.

Saya rasa itu Pak Yusuf Ateh, iya kalau bapak tertunduk iya saya minta maaf pak, kalau ini membuat bapak dalam posisi yang, yang tidak mudah tapi sekali lagi serius pak kalau Eriko Sotarduga jadi seperti Yusuf Ateh, saya akan melakukan itu. Mungkin saya harus tersingkir, *no problem*, karena kenapa, karena ini memberikan satu hal yang baik, yang tidak akan pernah terlupakan. Gajah meninggalkan gading, harimau meninggalkan belangnya, manusia meninggalkan nama baiknya, itu yang sering diingatkan juga oleh saudara-saudara saya di Komisi XI ini dan saya yakin Gus Fathan apalagi beliau NU sejati dan juga pimpinan pasti setuju hal ini karena niatan yang baik, tidak mungkin tidak akan terjadi, itu pasti bisa terjadi pak walaupun tidak mudah untuk kami sebagai dilegislatif sebagai Anggota Dewan, wakil rakyat sangat mendukung kali ini pak, kalau itu yang bapak lakukan kita akan mendukung berapa yang dibutuhkan. Memang program itu tidak bisa langsung jadi di dalam sekejap ya, tidak bisa, perlu beberapa waktu tapi kapan lagi kita mulai kalau tidak sekarang, kapan lagi kalau tidak kita siapa lagi.

*Nah*, itu dari kami Gus Fathan, Pak Yusuf Ateh, mohon maaf kalau tidak berkenan, begitu juga rekan-rekan, saudara-saudara saya di BPKP. Kami berkeinginan BPKP ini apa ya, memberikan sesuatu yang berbeda bahwa berani menunjukkan kami memang berbeda, ingin menjadi lebih baik. Saya rasa itu saja dari saya, Gus Fathan, mohon maaf kalau waktunya terlalu panjang, juga bersama Anggota Komisi XI yang saya banggakan, terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

*Wa 'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

Merdeka !

**KETUA RAPAT :**

Merdeka !

**F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM) :**

Pak Ketua, izin Ecky bicara Pak Ketua, sebentar.

**KETUA RAPAT :**

Silakan, silakan kalau habis *pfizer* kan semangat *kan*. Silakan, silakan.

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

Bukan, beda Gus. Kalau kita *udah*, ini pasti Kang Ecky dia ini..., itulah tugasnya.

**KETUA RAPAT :**

Pak Ecky kepancing, Pak Ecky kepancing, Pak Eriko kepancing, kepancing.

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

Benar di luar pemerintahan itu harus begitu Gus.

**KETUA RAPAT :**

Silakan, silakan Pak Ecky. Digitalisasi penting memang ini bagus Pak Eriko tadi itu.

**F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM) :**

Ecky memang oposisi Pak Eriko tapi Ecky dulu juga mantan BPKP Pak Eriko.

**KETUA RAPAT :**

Ya.

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

Siapa bilang oposisi Kang Ecky ?

Saya bilang di luar pemerintahan Kang Ecky, maju terus Kang Ecky.

**F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM) :**

Iya Pak Yusuf Ateh, kandaku, dan teman-teman deputi, saya *nggak* sebut satu-satu ya karena *udah* siang ini.

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**ANGGOTA :**

*Wa 'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM) :**

Saya cukup lama ya *nggak* ketemu, selamat tahun baru.

Saya sederhana saja karena kalau kita kan satu guru, satu ilmu. Iya bedanya beliau-beliau yang di BPKP *kan* pada garis yang *inline* dengan tugas dan poksi dan *knowledge* dan *experience*-nya. Kalau saya *kan*, jejak ya sampai ke DPR jejaknya.

*Simple* saja Pak Ateh dan kawan-kawan di BPKP, apakah kondisi sekarang, ya sistem pengendalian internal baik dalam konteks struktur, ya artinya struktur itu kelembagaannya, ada BPKP, ada Inspektorat Jenderal di kementerian, ada *it will approve*, ada *it will come* dan *scout* dan seterusnya. Kemudian di BUMN di wilayah negara kekayaan negara yang dipisahkan, iya itu juga ada SPI dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, apakah kondisi sekarang ini adalah kondisi yang ideal dalam membangun sebuah cita-cita dan tujuan dari sebuah sistem pengendalian internal baik dalam konteks struktural, dalam mekanisme kerja organisasi dan lain sebagainya.

Itu saja karena tadi teman-teman banyak bicara terkait anggaran *aja* itukan cerita anggaran BPKP ya, salah satu bentuk dari keseriusan sebuah entitas dalam hal ini pemerintah menganggap bahwa sistem pengendalian internal itu adalah penting, pengawasan internal penting adalah dia memberikan *allowance* yang memadai kepada lembaga yang memangku pengendalian internal tersebut.

Tadi secara gamblang ke teman-teman *mengomentari* ini BPKP anggarannya kurang, *nah* itu bentuk daripada ketidakseriusan kah pemerintah dalam hal menggawangi sistem pengendalian internal di pemerintahan ini ? jadi sederhana saja pertanyaannya itu termasuk di dalamnya adalah peraturan perundang-undang yang mengawasi, yang melingkupi atau yang menjadi alas dasar hukum dari sistem pengendalian internal kita dari berbagai level yang ada, iya level perundangan yang ada.

Itu saja karena saya tahu mestinya, iya mestinya dari ideal sebuah capaian dari sistem pengendalian internal yang baik kalau kita ukur seperti apa *sih* sebetulnya pengendalian internal yang bagus dalam konteks pemerintahan ini. Kemudian *output*, *outcome* daripada sistem pengendalian internal seperti apa ? tadi sebetulnya *symptom*, *symptom* lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah itu sudah disampaikan dalam temuan-temuan yang demikian banyaknya.

*Nah*, jadi pertanyaan saya adalah apakah ini adalah kondisi ideal. Kalau memang tidak, iya silakan nanti dijelaskan secara struktural, secara utuh dari A sampai dengan Z berdasarkan *knowledge* yang memadai, terkini, karena terkini itu pengendalian tentunya sudah sampai level dari mulai

pengawas dari perencanaan pembangunan itu sendiri maupun dari sisi *experience* pengalaman setelah kita beberapa kali paling tidak kalau kita lihat ada beberapa *fase* dalam konteks *merestrukturisasi* sistem pengendalian internal atau sistem pengawasan internal pemerintah ini.

Saya rasa demikian, Pak Ketua, pertanyaan saya sederhana tapi sangat apa, filosofi sangat mendalam dan dipahami oleh teman-teman BPKP apalagi oleh suhunya BPKP.

**KETUA RAPAT :**

Khas auditor ya, pertanyaan khas auditor ya ?

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

Iya nanti kalau *ngomongin pritil-pritilnya*, nantilah.

**KETUA RAPAT :**

Iya, iya.

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

Tidak harus dijawab sekarang tapi bisa dijawab tertulis, terima kasih Pak Ketua.

**KEPALA BPKP (M. YUSUF ATEH) :**

Iya, terima kasih. Terima kasih, *thank you*.

**F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM) :**

Terima kasih buat teman-teman semua di BPKP

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq.*

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

*Wa 'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih, Kang Ecky. Luar biasa melengkapi seluruh pendalaman, seluruh respon juga apa namanya masukan-masukan Pak Yusuf Ateh, Pak Kepala BPKP spektrumnya sangat luas. Tadi Pak Eriko pentingnya desain besar digitalisasi ini penting jadi memang karena masa pandemi dan ini distrupsi *kan* jadi BPKP harus membuat satu peta jalan digitalisasi sehingga *e-auditing* bisa lebih efektif, efisien sehingga nanti dengan apa namanya situasi kabupaten yang bertambah dan kemudian beberapa cakupan pengawasan yang pertama bisa kita efisien kan, *gitu. Nah*, seluruh jawaban-

jawaban seluruh respon tadi, pendalaman tadi tidak harus dijawab secara satu persatu, dijawab secara global aja nanti bisa di, yang lain bisa secara tertulis, sebelum pada masuk Kesimpulan.

Silakan Pak Yusuf Ateh, silakan.

**KEPALA BPKP (M. YUSUF ATEH) :**

Terima kasih Pak Ketua.

Bapak-Ibu Anggota Komisi XI yang kami hormati,

Saya pertama-tama ingin atas nama teman-teman BPKP mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu semua atas dukungannya terhadap kami BPKP dan yang kedua tentu saya izinkan saya mohon maaf sedikit ini mengenai yang istilah-istilah kami tadi yang terkawal akuntabilitasnya dan sebagainya tadi terkait dengan bantuan sosial, banyak bapak ibu menyampaikan bahwa di lapangan masih banyak ini. Maksud kami, kami barangkali salah dalam memberikan diksinya kepada bapak ibu mengenai apa namanya *slide* kami Nomor 5, yang kami maksudkan bahwa misalnya di dalam pengawalan PSN, Perlindungan Sosial dan sebagainya itu bukan artinya itu semua tanpa masalah. Jadi, supaya tidak ada kesimpulan bahwa yang di pusat sudah baik itu kami tidak bermaksud seperti itu artinya bahwa kalau kami bilang terkawal segala macam itu, itu kami bisa tahu permasalahannya, banyak koreksi di situ, banyak apa namanya penyelamatan uang negara di situ sebenarnya tapi kami tahu permasalahannya, artinya kami lakukan bisa pencegahan-pencegahan di muka misalnya untuk data-data yang memang masih banyak masalah itu bisa kami koreksi, bisa kami masukan rekomendasi kepada Menteri Sosial sehingga Menteri Sosial bisa memperbaikinya dan sebagainya.

Jadi ini untuk menjawab bahwa memang kami sependapat dengan bapak ibu masalah data di perlindungan sosial, UMKM dan sebagainya itu memang masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan itu masukan-masukan kami mengenai data-data sudah kami sampaikan kepada kementerian yang bersangkutan dan saya kira di Tahun 2021 seperti misalnya Kementerian Sosial dan UMKM banyak sekali koreksi-koreksi yang dilakukan dari hasil pengawasan kami artinya kalau kami bilang terkawal akuntabilitasnya. Permasalah-permasalahannya itu kami bisa ketahui di situ, bukan artinya sudah beres semua, gitu.

Kemudian yang kedua, yang ingin kami sampaikan mengenai cara pengawasan kami. Kalau pengertian kami menyampaikan arti pengawasan ini, ini maknanya ada yang dalam, ada yang sangat dalam seperti investigasi, ada yang sedang-sedang, ada yang sangat *cuman* sekedar *reviu*, jadi tidak semuanya kami dalam tergantung pada permasalahan dan juga kesediaan sumber daya kami, baik auditornya dan juga anggaran yang kami punya. Jadi, tidak semua pengawasan kami ini (***rekaman kurang jelas/suara kurang jelas***) sehingga sampai orang-orangnya segala macam permasalahan itu kami ketahui. Kami misalnya *reviu* seperti PSN tidak semua proyek strategi



nasional ini kita masuk secara dalam. Ada yang *reviu*, ada yang evaluasi tetapi dalam beberapa permasalahan kita ada yang masuk ke dalam. Jadi seperti itulah makna pengawasan kami yang kami sampaikan kepada bapak, ibu sehingga agenda kami di Tahun 2022 tidak semuanya dalam, artinya sampai investigasi tapi tidak semuanya juga sangat dangkal seperti *reviu*. Jadi ini semuanya adalah kombinasi hal tersebut dan tergantung pada permasalahan di lapangan dan juga keterbatasan sumber daya kami.

Kemudian yang juga banyak disinggung tadi bapak, ibu mengenai evaluasi *ya pak ya*, evaluasi apa namanya, terhadap 18 kabupaten kota itu juga sangat *dikit* sekali tapi kami punya mengambil kesimpulan bahwa memang belum diperbaiki. *Nah*, cara evaluasi kami ini bukanlah seperti audit *pak ya*, evaluasi ini kami bantu, jadi yang keliru itu langsung kami perbaiki dan biasanya para bupati dan kepala daerah yang ininya langsung memperbaikinya, karena koreksi misalnya kita lakukan Tahun 2021 itu secara keseluruhan baru kita bisa perbaiki untuk yang selanjutnya secara sistematis seperti yang diharapkan oleh Pak Erick itu baru di 2024 karena tanggal-tanggal apa namanya, ketetapan-ketetapan perundang-undangan tentang anggaran dan sebagainya itu tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan secara mendasar, tapi perbaikannya perlu waktu, tadi disampaikan Pak Erick. Jadi, perbaikan kami itu sebenarnya sistematis, cuma banyak sekali yang diperbaiki.

Kemudian kami juga sependapat dengan bapak ibu mengenai perlunya kita melakukan sosialisasi dan peningkatan kompetensi di desa yang 74 ribu desa, tapi kita sama-sama ketahui memang sangat terbatas sekali anggaran yang kami miliki dan bapak ibu juga sebenarnya tahu. Jadi kalau boleh kami sarankan barangkali bapak ibu di Komisi XI, bisa langsung minta dana khusus barangkali kepada *kan* bapak ibu juga yang buat anggarannya apa, Banggar di situ juga perasaan saya, *kan*. Jadi, untuk sosialisasi di desa terkait dengan dana desa ini itu. Saya kira itu yang bisa saya sarankan kepada bapak ibu sehingga kita juga punya anggaran yang cukup untuk melakukan sosialisasi di desa-desa dan melakukan pendidikan dan sebagainya di desa-desa.

Kemudian yang untuk daerah, kami sudah bapak ibu juga punya pedoman sebenarnya bagaimana membuat perencanaan dan perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah. Di pusat kami akan masuk di Tahun 2022 ini bapak ibu sekalian. Jadi pusat belum bagus seperti yang disampaikan juga sama seperti barangkali juga dan itu hanya keterbatasan anggaran dan keterbatasan orang *aja* yang membuat kami belum masuk semuanya, jadi mudah-mudahan bisa nanti kita masuknya di Tahun 2022 ini. Beberapa bagian secara terpisah terhadap anggaran-anggaran misalnya ditambahkan tambahan anggaran, itukan dimintakan *reviunya* oleh Menteri Keuangan kepada kami, di situ banyak sekali koreksi-koreksinya. Jadi sebuah koreksi-koreksinya banyak sekali dan kita bisa lakukan koreksi secara di awal mungkin pada saat adanya tambahan-tambahan anggaran.

Bapak-Ibu sekalian,

Hal-hal lainnya mengenai apa namanya tadi mengenai permasalahan yang tol dan sebagainya nanti kami akan jawab secara tertulis ya karena banyak sekali beberapa pertanyaan dari bapak ibu sekalian ini yang sifatnya sangat teknis dan sepanjang kami tahu nanti akan kami perbaiki. Untuk Pak Erick, Pak Ericko ini kami sampaikan, kami memang fokus kami, ini kami melakukan perbaikan pada sistem-sistem yang banyak, jadi memang kami coba untuk masuk sistem itu cuma tidak semua tentu saja itu bisa kami lakukan karena keterbatasan kami di BPKP.

Saya ingin tambahkan kepada bapak ibu sekalian bahwa dalam konten, konten, konten dari pada pengambilan kebijakan, BPKP tentu saja tidak terkait tetapi begitu program atau kebijakan yang sudah dilaksanakan kemudian ingin dikerjakan diawal mulai percepatan pembangunan, kami boleh masuk untuk memberikan masukan-masukan, tapi awalnya konten itu tidak menjadi tanggung jawab kementerian, lembaga atau Pemda yang terkait, jadi ini untuk menjawab beberapa hal, tapi kalau ada misalnya isu-isu dari bapak ibu misalnya yang memang penting untuk kita tindak lanjuti, untuk kita perdalam itu bisa saja bapak ibu menyampaikan ke kami dan kami akan melakukan pemeriksaan dalam seperti yang disampaikan mengenai Formula E dan sebagainya, tentu tidak secara khusus kami bisa mengawasi semua se Indonesia ini karena masing-masing sudah ada, tadi sudah disampaikan Pak Ecky ada, ada pengawas internal di daerah, ada kementerian lembaga (*rekaman kurang jelas/suara kurang jelas*), ini juga bagian diluar yang di bawah Presiden yang juga menjadi fokus-fokus Bapak Presiden yang kami lakukan pengawasannya kembali, jadi ini luas sekali Indonesia. Kami sepanjang kami bisa lakukan, percayalah kami akan lakukan perbaikan-perbaikan itu, kami akan lakukan pengawasan-pengawasan itu.

Demikian yang secara ringkas bisa kami sampaikan pada Pak Ketua, nanti untuk selanjutnya seperti pertanyaan Pak Ecky yang walaupun sederhana tapi jawabnya panjang sekali itu dan sebenarnya bisa dibahas sendiri, nanti kami akan coba jawab secara singkat di dalam jawaban tertulis kami kepada bapak ibu semua di Komisi XI. Demikian Pak Ketua yang bisa kami sampaikan.

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

Terima kasih Pak Ateh.

**KEPALA BPKP (M. YUSUF ATEH) :**

Saya kembalikan pada Pak Ketua, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik.

**KEPALA BPKP (M. YUSUF ATEH) :**

Mohon maaf kalau ada yang salah kata-kata yang tidak berkenan, saya akhiri dengan *wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*.

**KETUA RAPAT :**

*Wa 'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

Izin singkat, singkat Pimpinan, izin.

**KETUA RAPAT :**

Siap Pak Eriko.

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

Iya terima kasih Pimpinan dan rekan-rekan Komisi XI.

Pak Yusuf Ateh, kalau memang itu sudah niat dan keinginan bapak untuk melakukan yang terbaik, tadi sudah Pak Ecky, semuanya sudah kasih masukan tapi ya Pak Ecky kasih masukan itu yang konkrit, yang jelas supaya, supaya bisa, bisa dilakukan lebih sempurna.

Bapak segera *launching* pak, jadi 2022 ini, 2023 dan 2024 tiga tahap di mana nanti ini akan melakukan perubahan yang luar biasa dan ini bisa membuat apa ya, ada satu kepastian pak. Jangan nanti orang yang melakukan tugasnya tidak ada kepastian pak, ini penilaian yang seperti ini. Kalau kata orang Medan bilang *ngeri-ngeri* sedap pak. *Nah*, itu *nggak* bagus pak, itu yang saya sebutkan tadi itu mengenai abu-abu itu tadi. Jadi ini, ini ilmu yang justru kami inginkan dari bapak dan bapak sudah menyampaikan. Kalau itu sudah memang ada keinginan dan ada perencanaan itu, segera pak kita bicarakan, kan *launching* pak dan itu, itu baik sekali efeknya itu, itu akan membuat semua juga berpikir untuk melakukan hal yang tidak tepat.

Saya itu barangkali pimpinan masukan dari kami, terima kasih Pak Yusuf Ateh. Mohon nanti jawabannya juga secara tertulis, terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Merdeka !

**KETUA RAPAT :**

Baik.

Merdeka !

Terima kasih Pak Eriko dan semua teman-teman yang hadir, untuk selanjutnya silakan Sekretariat untuk menampilkan Kesimpulan RDP pada siang hari ini.

Rancangan Kesimpulan RDP DPR RI Komisi XI dengan Kepala BPKP mengenai Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022, Komisi XI DPR RI bersama dengan Kepala BPKP menyepakati hal sebagai berikut :

1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh Penjelasan dari Kepala BPKP mengenai evaluasi dan capaian kinerja BPKP Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022.
2. BPKP agar meningkatkan kinerja pengawasan terhadap pembangunan nasional, badan usaha dan pengendalian internal yang merupakan sasaran strategis BPKP agar pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional dapat terselenggarakan dengan baik.
3. BPKP dalam menjalankan kebijakan program dan kegiatan belanja pada Tahun 2022 akan diadakan secara optimal untuk mencapai kualitas belanja yang efisien, produktif dan efektif dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. BPKP agar mengupayakan peningkatan kualitas laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah melalui pendampingan penguatan pengendalian intern dalam pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan pendampingan *reviu* Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh APIP.

Lima, lima ya, apa empat itu ?

Empat ...,pendidikan dan pelatihan pada APIP agar lebih efektif melakukan pengawalan keuangan, keuangan daerah 4, yang lima tadi;

5. BPKP kualitas laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah melalui pendampingan, penguatan pengendalian intern, pendampingan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pendampingan keuangan pemerintah daerah oleh APIP.
6. Komisi XI DPR RI mendukung peningkatan alokasi anggaran untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (***rekaman kurang jelas/suara kurang jelas***) anggaran Tahun 2023 dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan.
7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI paling lama 7 hari kerja.

Yang Pak Eriko, digitalisasi masuk di enam mungkin ya ?

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

Betul Pimpinan, setuju Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Apa bahasanya Pak Eriko ?

**F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM) :**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Iya.

**F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM) :**

Itukan pertanyaan saya dan teman-teman itukan *nyambung*, iya *nyambungnya* begini pimpinan, harus dilakukan dulu apakah tadi ada gini, ada kondisi ideal tidak *sih* dalam konteks peraturan perundang-undangan, organ sistem organisasi termasuk anggaran dan lain sebagainya. Digital itu bagian daripada solusi yang ditawarkan, salah satunya. *Nah*, itu mungkin apakah nanti perlu sekarang atau mau dibuat sebuah kesimpulan normatif tadi, seperti itu.

**KETUA RAPAT :**

Jadi *nggak usah* masuk dulu ya, *nggak usah* masuk dulu ya ?

**F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM) :**

Boleh juga, tapi kalau mau masuk menjadi komprehensif Pimpinan misalnya BPKP akan melakukan *reviu* terkait dengan sistem internal pemerintah yang ideal *bla bla bla bla*, iya salah satunya dengan pendekatan, salah satunya, solusinya adalah digitalisasi *gitu*. Kalau mau sekarang, tapi kalau mau tidak, nunggu jawaban dulu dari mereka. Demikian Pak Ketua.

**KETUA RAPAT :**

*Oke nunggu* jawaban dulu *ajalah*.

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

Begini Pimpinan.

**ANGGOTA KOMISI XI DPR RI :**

Iya belum dijawab *kok* itu.

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

Begini Pimpinan, sebenarnya itu digitalisasi bagian dari perubahan

sistem pengawasan yang lebih baik.

**KETUA RAPAT :**

*Oke.*

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

Itu bukan, bukan menjadi itu hal yang utama tapi itu adalah salah satu komponen untuk menyempurnakan supaya, *kan* inikan laporan Pak Yusuf Ateh yang kita tadi ini *kan*, bahwa ada 30% lebih terjadi tidak sampai kepada yang berhak. *Nah*, bagaimana perbaikan yang dilakukan ? itu yang tadi saya sebutkan sebenarnya supaya Kang Ecky bisa memberikan yang konkrit, *gimana* perbaikannya.

*Nah*, kalau menurut saya di sini disampaikan bahasanya ini *ya*, saya kurang begitu apa melakukan *ya*, apa pengkinian, standar operasional prosedur sistem supaya hal ini tidak terjadi lagi ke depan, seperti itu pimpinan dan ini bisa dilakukan secara bertahap dan kita mendukung peningkatan anggaran BPKP untuk menyempurnakan hal itu. *Nah* ini, ini yang saya ini kan pimpinan, usul saya konkrit.

**KETUA RAPAT:**

Bahasanya *gimana* ?

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

*Nah*, apa namanya untuk pengendalian intern, pendampingan dan lain-lain, dan lain-lain, *reviu* dengan melakukan penyesuaian sistem pengawasan yang lebih baik.

**KETUA RAPAT :**

Pendampingan *reviu*.

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

Iya.

**KETUA RAPAT :**

Dengan melakukan,

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

Iya, perubahan penyempurnaan sistem pengendalian yang lebih baik atau sistem operation prosedur yang lebih baik. Jadi, digitalisasi hanya satu bagian dari itu.

**KETUA RAPAT :**

Iya, oke, oke.

**F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM) :**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Iya.

**F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM) :**

Kalau mau sekalian *nambahin*, sebetulnya *kan* saya berangkat dari awal, ketika BPKP, BPKP *kan* tadi baru sebetulnya beliau-beliau baru melaporkan, Pak Yusuf Ateh tadi melaporkan ya pelaksanaan di Tahun 2021 kemarin.

**KETUA RAPAT :**

Kerjanya ? Prestasinya ?

**F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM) :**

Betul *ya*, itu potret dia, dia belum bukan melakukan analisis bagaimana *sih* sebetulnya sistem pengendalian, pengawasan atau pengendalian internal pemerintahan yang ideal ? *gitu* kan. Dia belum melakukan asesmen itu, baik dalam konteks pusat maupun dalam konteks tadi ada irjen, bagaimana posisi yang terstruktur termasuk perundang-undangannya. *Nah*, dari *mapping* seperti itulah kemudian seperti apa sebetulnya gagasan BPKP Pak Yusuf, dari Pak Yusuf Ateh dan teman-teman ini, seperti ini *loh* kalau *pengen* Indonesia ini maju ke depan, sistem pengendaliannya bagus, mendukung tujuan bernegara kita *ya*. Kemudian pelaksanaan anggaran akuntabel untuk kesejahteraan dan kemakmuran seperti ini *loh* bahkan dipetakan, sampai kepada peraturan perundang-undangannya. Gagasan Pak Yusuf Ateh, *oh* ternyata perlu *loh* ada peraturan perundang-undangan yang disempurnakan misalnya. *Oh* perlu ada *loh* organisasi yang misalnya perlu direkonstruksi ulang, *oh* ada sistem kerja yang harus diperbaiki, *oh* harus ada digitilisasi yang disampaikan oleh pak siapa Namanya ? Pak Eriko, itu betul sekali tetapi menurut saya memang harus dikaji dulu oleh pak, oleh teman-teman di BPKP.

*Nah*, itulah kalau mau komitmen itu yang dinyatakan oleh apa namanya BPKP dan didukung oleh kita termasuk ujungnya adalah konsekuensinya tentu menambah anggaran BPKP termasuk keinginan teman-teman terkait sosialisasi. Kalau sosialisasi itu adalah konstruktif dalam konteks pengawasan pembangunan khususnya untuk pembangunan pedesaan kenapa tidak kita *lowers* di situ ? maksud saya mungkin bisa dilemparkan ke Pak Yusuf Ateh untuk nomor tambahan kesimpulan kalau tadi

karena Pak Ketua yang mengusulkan *kan ya* supaya lebih komprehensif, demikian nanti *warning* nya seperti apa, mencakup apa yang diinginkan oleh Pak Eriko dan teman-teman dan mungkin juga yang saya sampaikan barusan. Demikian Pak Fathan, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Coba Pak Yusuf Ateh ada masukan ?

**KEPALA BPKP (M. YUSUF ATEH) :**

Pak Ketua ?

**KETUA RAPAT :**

Yes.

**KEPALA BPKP (M. YUSUF ATEH) :**

Yang, yang ditanyakan oleh Pak Ecky itu, itu sangat komprehensif sekali *ya* artinya yang juga termasuk yang disampaikan oleh Pak Eriko, tentu untuk Tahun 2022 kalau kita mau melakukan seperti bulan itu kan kita memang belum ada anggarannya untuk melakukan apalagi kalau untuk memeriksa secara mendalam tapi memang kecil-kecil sudah kami lakukan misalnya kami membangun Sistem Siskeudes untuk orang dan ini semua juga tidak semua seperti yang saya sampaikan ada kewenangan di tempat kami secara menyeluruh kalau melakukan pembenahan di negara ini karena kami hanya auditor dari pada Bapak Presiden dari pemerintah. Jadi, misalnya untuk perbaikan laporan keuangan segala macam yang tadi saya sampaikan secara digital misalnya katakan Pak Eriko, paling kami hanya bisa memberikan saran rekomendasi kepada Mendagri dan Kementerian Keuangan, katakan *aja* kemarin masalah transfer dana segala macam, kami hanya bisa memberikan rekomendasi tapi yang melakukan perbaikan-perbaikan adalah di Departemen Keuangan dan di dalam Kementerian Dalam Negeri karena memang itu merupakan tugas mereka.

Maka tadi saya sampaikan sebatas kewenangan yang bisa kita lakukan, kita pasti akan melakukan perbaikan-perbaikan secara sistematis misalnya kami membangun satu Siswadeus yang tadi disampaikan juga untuk pengembangan memantau desa secara digital, kami sepakat dengan, dengan yang disampaikan Pak Eriko bahwa memang mau tidak mau kita harus menggunakan secara digital. Kami melakukan perbaikan misalnya di dalam sistem BPKS tapi yang melakukan perbaikan adalah di sana juga karena kami tidak punya anggaran dan tidak punya kewenangan untuk melakukan perbaikan itu.

*Nah*, yang disampaikan pak, Pak Ecky tadi kami akan menjawab, kami akan lakukan memang, kami akan sampaikan sebenarnya seperti inilah kondisi itu, saya kira diharapkan oleh Pak Ecky, yang sebenarnya Pak Ecky



juga sudah tahu itu jawabannya pak, Pak Ketua sebenarnya permasalahan-permasalahan apa, *cuman* dia minta dari kami yang *ngomong* dan itu semua.

**KETUA RAPAT :**

Pak Ecky *udah* tahu, Pak Ecky.

**KEPALA BPKP (M. YUSUF ATEH) :**

Pak Ecky sebenarnya *udah* tahu apa itu kekurangan-kekurangan, apa masalahnya, ini lagi *kerjain aja* supaya kita kejeprit ini pak.

**F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM) :**

Bukan begitu, maksudnya.

**KEPALA BPKP (M. YUSUF ATEH) :**

Makannya dia, kalau sekarang bisa *nggak* melakukan perbaikan ? ada masalah-masalah yang artinya jadi saya kira jangan ditulis seperti ini karena kalau nanti ditulis kami nanti *nggak* bisa melakukan secara penuh karena anggarannya *nggak* ada.

**KETUA RAPAT :**

Baik, baik tapi sebetulnya dengan masukan yang Nomor 5 bahwa itu saya kira jalan tengahnya.

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

Betul, betul.

**KETUA RAPAT :**

Dengan melakukan perubahan dan penyempurnaan sistem teknologi itu jalan tengah dari.

**KEPALA BPKP (M. YUSUF ATEH) :**

Bisa Pak, bisa, bisa.

**KETUA RAPAT :**

Seluruh masukan tadi, spektrum yang luas tadi salah satunya adalah perubahan dan penyempurnaan sistem informasi teknologi *gitu, oke* sepakat semua ?

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

Sedikit Gus Fathan.

**KETUA RAPAT :**

Yes.

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

Sebenarnya ini karena tadi penyampaian dari Pak Yusuf Ateh sendiri dari BPKP minta pendukung dari Komisi XI untuk anggaran dengan menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada, tidak sampainya secara, secara baik yang berhak, katakan ada 30% lebih, *kan* sebenarnya itu intinya. *Nah*, sekarang bagaimana kita mau meminta anggaran penambahan, anggaran secara khusus kalau kita tidak punya dasar yang kuat. *Nah*, tadi *udah* disampaikan oleh, oleh Kang Ecky juga, sudah disampaikan oleh teman-teman. *Nah*, inilah yang sebenarnya kita berikan kepada BPK, Pak Yusuf Ateh sebenarnya seperti itu, kalau ini nanti saya sampaikan *nggak* akan terjadi ini, benar yang disampaikan Pak Misbakun.

**KETUA RAPAT :**

*Oke, oke.*

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

Itu saja Gus Fathan, kembali kepada BPKP, kalau kami tentu apa masalahnya dengan melakukan perubahan penyempurnaan sistem informasi teknologi walaupun kalau saya pribadi saya akan melakukan lebih, lebih *progresif* dan *revolusioner*, jujur-jujur saja kenapa tidak ?

**KETUA RAPAT :**

Tidak ada masalah bagi BPKP.

**F-PDIP (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.) :**

*Nggak* ada masalah, iya ini kembali kepada, kepada pimpinan dan rekan-rekan dan juga BPKP, terima kasih gus.

**KETUA RAPAT :**

Baik terima kasih, Kesimpulan Nomor 1 sampai 7 Pak Yusuf Ateh, *oke* setuju ?

**KEPALA BPKP (M. YUSUF ATEH) :**

Cukuplah Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Baik, baik.

**KEPALA BPKP (M. YUSUF ATEH) :**

Cukup.

**KETUA RAPAT :**

Cukup, terima kasih Pak Yusuf Ateh, Kesimpulan kita sepakati.

Baik, dengan demikian RDP pada siang hari ini bisa kita akhiri selama 3 jam lebih diskusi kita sangat produktif, semua isu-isu dan tema-tema tentang pembangunan nasional bisa kita kritisi bersama dan sebelum saya tutup. Silakan, Pak Kepala BPKP untuk memberikan Kata Penutup.

**KEPALA BPKP (M. YUSUF ATEH) :**

Baik terima kasih Pak Ketua, kami sependapat dengan Pak Ketua dari semua tadi Nomor 7 poin itu kami bisa dipahami dan kami bisa sepakati, dan sekali lagi kami terima kasih atas dukungan dan arahan dari bapak ibu semua di Komisi XI. Kami sampaikan komitmen kami untuk selalu melakukan yang terbaik, untuk bekerja secara efektif efisien dan akuntabel berdasarkan apa yang diamanahkan (***rekaman kurang jelas/suara kurang jelas***). Tentu yang bisa kita lakukan dan bisa sesuai dengan program-program kami yang dianggarkan di Tahun 2022 ini.

Terima kasih sekali lagi kepada bapak ibu sekalian, Pak Ketua dan Bapak-Ibu Anggota Komisi XI yang berada melalui *Vicon* ini, karena dirapat secara *Vicon*, kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dari kami.

Terima kasih Pak Ketua.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

*Wa 'alaikum salam Warahmatullah Wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Kepala, Pak Sestama.

**F-PDIP (Prof. HENDRAWAN SUPRATIKNO) :**

Terima kasih semuanya salam sehat.

**KETUA RAPAT :**

Untuk yang hadir RDP pada hari ini, saya tutup.

*Wallahuminkum.*

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.10 WIB)**

Jakarta, 7 Februari 2022

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos.  
NIP. 197106131998032003